

BELUM DIKOREKSI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA MARGA, DAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PUPR**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 16 Juli 2018
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d 20.00 WIB
Tempat	: Ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien - Jakarta.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan Mei 2018. 2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran K/L TA.2019 masing-masing unit Eselon I Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
Ketua Rapat	: Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KETUA RAPAT (FARY DJEMY FRANCIS):

... atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Walaupun pasti hari ini, pagi ini ada dua kemungkinan, yang kesatu tidak hadir karena Kroatia kalah, atau yang menang Prancis itu kesenangan sampai ketiduran, berdasarkan informasi dari sekretariat dia membawa daftar hadir dari anggota sekretariat, bahwa daftar hadir anggota DPR RI lagi ditandatangani sebanyak 18 anggota, terdiri dari 7 Fraksi, dari 10 Fraksi dan lebih separuh unsur Fraksi sehingga memenuhi korum.

Nanti keputusan kita akan menunggu satu pimpinan lagi tetapi kita akan lanjutkan, karena pak Lasarus sudah datang, dan sebenarnya pak Lasarus yang akan memimpin, tetapi karena tiba-tiba ada keluarga yang masuk ICU sehingga pak Lasarus minta izin untuk kerumah sakit, dan saya diminta untuk memimpin rapat dengan dinamika dan bina konstruksi pada siang hari ini, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 251 peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkan saya membuka rapat pada hari ini dan pasal 246 ayat 1 rapat Komisi V DPR RI pada hari ini, kita nyatakan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.06 WIB

Teman-teman anggota kami bisa lanjutkan pak ya, pada saat nanti kita akan mengambil keputusan kita menunggu salah satu pimpinan, kita akan mendengarkan pemaparan dari para Dirjen, dan kemudian nanti kita akan memberikan input masukan, pada saat kita mengambil keputusan kesimpulan kita harapkan salah satu dari pimpinan untuk bisa hadir untuk kita mengesahkan RDP kita pada siang hari ini.

Kami atas nama pimpinan, anggota Komisi V DPR RI, dan masih dalam rangka idul fitri, mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1439 hijriah mohon maaf lahir batin, apabila dalam proses pelaksanaan tugas dan kerjasama kita selama ini ada hal yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dirjen Bina Marga, dan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat dengar pendapat hari ini.

Sebelumnya kami ingin menyampaikan ada keanggotaan dari Fraksi PAN, Fraksi Parta Demokrat di Komisi V DPR RI yaitu yang pertama dari Fraksi PAN, itu Hj. Intan Fitriana Fauzi SH, LLM, nomor anggota 474 daerah pemilihan Jawa Barat VI, selamat datang bu, Ibu Intan yang kemarin baru ya, selamat datang, yang kedua ini senior kita ini, Jhony Alen Marbun, nomor anggota 400 daerah pemilihan Sumut II.

Saudara Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta para hadirin dan anggota Komisi V DPR RI yang kami hormati.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan para Menteri mitra kerja Komisi V DPR RI pada Rabu 16 Juni 2018 yang lalu, telah disepakati beberapa hal diantaranya untuk Komisi V DPR RI memahami paparan tentang pagu indikatif kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi masing-masing sesuai dengan satu surat Menteri PUPR, Menteri keuangan dan Menteri PPN kepala Bapenas nomor KU .01.01/MN/610 tanggal 3 Mei 2018 hal usulan penyesuaian pagu indikatif kementerian PUPR tahun 2019. Sebagai berikut, satu, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebutuhan Rp.138.363.546.044.

Penyesuaian 43 DIM Rp.102.017.001.436, selain itu terdapat pendanaan melalui skema kerjasama Pemerintah Badan Usaha (rekaman tidak jelas) pada kementerian PUPR sebesar 5,1 trilyun, selain ini Komisi V DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu indikatif tahun 2019, yang diusulkan untuk membiayai program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Dua, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perhubungan dan Kementerian PDT dan Transmigrasi untuk memprioritaskan penyelesaian program-program prioritas dalam RPJMN 2014-2019 dan terus meningkatkan jumlah alokasi untuk program infrastruktur berbasis masyarakat antara lain pisau, (rekaman tidak jelas), dan lain-lain.

Program kerakyatan disektor perhubungan antara lain (rekaman tidak jelas) dan fasilitas keselamatan jalan, bus sekolah dan kapal rakyat, dan program lainnya disektor desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Tiga, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menyesuaikan, alokasi pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKAKL, RAPBN pada tahun 2019 berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI. Dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah, anggota Komisi V DPR RI sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Oleh karena itu dalam korum rapat pembicaraan pendahuluan hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada para anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan usulan-usulan dalam rangka memperjuangkan program pembangunan, baik yang berskala nasional maupun yang khusus, berkait dengan aspirasi dari daerah pemilihannya, kami harapkan agar dalam proses penyusunan pagu indikatif belanja kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI,

para pejabat Eselon I benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Demikian pengantar kami, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada saudara Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina konstruksi, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, untuk menyampaikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai rencana kerja dan anggaran masing-masing unit organisasi pada tahun anggaran 2018.

Dirjen nanti sebagaimana Rapat kerja kita dengan pak Menteri kita lebih fokus dengan kesimpulan rapat kita terutama berkaitan dengan lokasi program infrastruktur berbasis masyarakat yang tahun 2019 ini didorong dan juga kita juga akan menindaklanjuti berkaitan dengan program-program yang sudah diusulkan ditahun 2018 ini yang sudah lagi berjalan, sejauh mana program itu sudah terlaksana dan akan direncanakan.

Termasuk juga kita harapkan pada kesempatan ini, Dirjen bisa memberikan gambaran terhadap usulan-usulan anggota, baik itu program yang berskala nasional dari hasil kunjungan kerja komisi spesifik maupun kunjungan kerja perorangan di daerah pemilihannya yang sudah diusulkan ditahun 2018 dan sejauh mana program itu jalan, dan tahun 2018 ini kelanjutannya ditahun 2019 seperti apa, saya kira ini akan menjadi fokus kita, atau rapat dengar pendapat kita dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi.

Kami persilakan kepada pak Dirjen, karena beberapa anggota kita Komisi V DPR RI ini ada yang baru, silakan pak Dirjen mungkin juga bisa memperkenalkan jajarannya, terutama juga kepala Balai di daerah pemilihan daripada anggota-anggota untuk bisa diperkenalkan, kami persilakan pak Dirjen.

DIRJEN BINA MARGA:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya.

Yang saya hormati bapak (rekaman tidak jelas).

Yang mulia pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Sesuai tugas dari bapak pimpinan izinkan kami memulai dengan memperkenalkan jajaran dari Direktorat Jendral Bina Marga, yang pertama adalah bapak Ses Dirjen Bina Marga pak Subagiono, kemudian bapak Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, pak Rahman, kemudian bapak Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan fasilitas jalan daerah pak Sugi Hartato, sebelah kirinya adalah bapak Rahardian direktur Reservasi jalan, kemudian Direktur Pembangunan Jalan bapak Dani, dan sekretaris badan pengatur jalan tol, bapak Daraba, mohon maaf bapak Kepala BPJT sedang sakit hari ini tidak bisa hadir, kemudian seluruh balai, kepala balai

hadir bersama kami, dari Balai 1 Aceh pak Suki, kemudian Balai 2, mencakup Sumatera Utara dan Riau pak Paul, kemudian Balai 3, pak Saiful mencakup Sumatera Barat dan Bengkulu kemudian balai 4 pak Junaidi, Jambi dan kepulauan Riau, kemudian Balai 5 beliau sudah purna bakti jadi sementara ada PLT nya, PLT nya adalah pak Dani Direktur Pembangunan dan hari ini juga ada Kasub di sebelah sana, pak Iksan, kemudian Balai 6, pak Yanto.

Beliau mencakup DKI, Jawa Barat dan Banten, kemudian Balai 7 pak Heri Marzuki mencakup Jawa Tengah, DIY, kemudian balai 8 pak Ketut cakup Jawa Timur dan Bali, kemudian pak Budi Yamin Balai 9, kemudian NTB, kemudian pak Nanung dari Balai 10, NTT, kemudian Balai 11 pak Timbul.

Kemudian balai 12 pak Refli jadi balai 11 itu mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, sedangkan Pak Rendy balai 12 mencakup Kalimantan Utara dan Kalimantan, eh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Balai 13 pak Munir mencakup Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kemudian balai 15 pak .. mencakup Sulawesi Utara dan Gorontalo, kemudian Maluku, Balai 14 pak Ahmad Cahyadi, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terus Satrio dari Maluku, dan Maluku Utara, dan yang terakhir pak Osman dari Papua.

Demikian, Direktorat Jendral Bina Marga, izinkan kami akan memaparkan yang pertama adalah kaitanya dengan disesuaikan dengan yang ditugaskan oleh pimpinan, progres APBN tahun anggaran 2018 kemudian strategi dan kebijakan program 2019 yang terkait dengan pagu indikatif yang terjadi.

Bapak pimpinan sampaikan dari historinya kemudian sumber anggaran dan alokasinya, kemudian yang keempat proyek strategis Dirjen Bina Marga, kami harapkan semuanya sudah mendapatkan bahan, nanti kami sampaikan, ada bahan yang bisa dibaca Bapak Ibu semuanya.

Kami akan mulai dengan pagu anggaran APBN tahun 2018, Bapak Ibu semuanya, anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan, jadi Jendral Bina Marga diberi tanggung jawab untuk mengelola anggaran sebesar 41,673 trilyun rupiah, namun demikian sebetulnya realita kami harus mengelola lebih kurang 44 trilyun karena ada luncturan SBSN tahun anggaran 2017, yang kami optimalisasikan untuk digunakan di 2018 sebesar 0,8 trilyun lebih kurang, kemudian adalah, kemudian percepatan penarikan (rekaman tidak jelas) lebih kurang 1,5 trilyun, jadi kita tarik menjadi tahun 2018 untuk mempercepat penyelesaian.

Dari anggaran tersebut Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat progresnya saat ini, secara fisik kami sedikit terlambat, kalau salah fisiknya sebetulnya salah schedul, tetapi kalau penyerapan keuangannya agak lambat, namun demikian bila dibandingkan dengan tahun 2017 kita penyerapannya lebih rendah, karena kami menstrukturkan anggaran dengan tahun jamak, supaya efisien penggunaanya, kemudian keuangannya penyerapannya baru dikurang 27% yang seharusnya 33%.

Jadi ini satu pelajaran karena kita ada beberapa kontrak mengalami beberapa kesulitan karena masalah jaminan pelaksanaan, salah satunya dengan kontrak luar negeri, karena penerbitan harus di lembaga penjamin luar negeri juga itukan ya, diharapkan dalam minggu-minggu ini terjadi percepatan yang menarik.

Kalau kita lihat progres keuangan fisik perbalai bisa kita lihat pada slide berikutnya, jadi kita bisa lihat balai-balai yang penyerapannya cepat dan balai-balai yang agak terlambat, tetapi saya yakin kontraknya multiyears, secara besar-besaran di tandatangani minggu kemarin dan minggu ini, ini progresnya akan semakin cepat Bapak Ibu semuanya.

Yang berikutnya, kami izinkan kami menyampaikan lampiran sampel progres fisik dan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat menjadi perhatian masyarakat, yang pertama, seperti yang diminta oleh bapak pimpinan, seperti Jembatan gantung, ini lebih sangat terkait langsung dengan masyarakat Bapak Ibu semuanya.

Kami mendapat tugas untuk tahun 2018 167 jembata gantung dan 2019 kami merencanakan akan membangun 173 jembatan gantung, hingga tanggal 1 juli 2018 berarti progres sampai 1 Juli 2018, dari target 167 jembatan gantung ada 106 prioritas, itu usulan dari wakil-wakil DPR, dari 106 ini 84 ada usulan sudah fix karena sudah sesuai dengan kriteria dan mendapat dukungan dari pak (rekaman tidak jelas) dengan syarat dinas yaitu kesiapan lahan dan permintaan kepala daerah kenapa hari ini harus ada karena jembatan ini harus dihibahkan pak, karena ini dipeliharaan oleh daerah kemudian juga kesanggupan daripada penerima hibah tersebut dan memeliharanya.

Kemudian 22 masih dalam proses (rekaman tidak jelas) 106 ini diusulkan oleh 56 anggota DPR jadi masih ada beberapa DPR yang belum mengusulkan jembatan ini jadi kami menunggu, yang berikutnya adalah ada 61 alokasi dari Pemda dan dari masyarakat luas, ini progres per 1 Juli Bapak Ibu semuanya.

Yang berikutnya, izinkan kami menyampaikan juga sedikit laporan pada pimpinan dan anggota dewan yang mulia kaitanya dengan performance kami dalam memberikan dukungan jalur lebaran tahun 2018 Bapak Ibu semuanya, kenapa ini sangat penting terutama untuk menjadikan bahan evaluasi karena mulai selesainya lebaran kemarin kami langsung bergerak untuk menyiapkan untuk lebaran nanti kita rencana hari kamis.

Kalau begitu kita akan coba masuk ke strategi dan kebijakan program kerja tahun 2019 Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui Bapak Ibu semuanya ada beberapa hal yang harus kami kerjakan termasuk dalam renstra, yang pertama kami ditugasi untuk membangun jalan bebas hambatan sepanjang 100 km, kemudian pembangunan jalan nasional sepanjang 2550 km, kemudian memelihara jalan nasional, yang tadinya hanya 38 ribu untuk tahun 2015 2019 kami harus memelihara 47 ribu kilometer jalan, kenapa bertambah lebih kurang 9000 karena banyak yang dari jalan kabupaten dan provinsi di limpahkan untuk dipelihara untuk Pemerintah pusat.

Kemudian membangun fly over dan underpass, sepanjang 15 ribu meter, kemudian dukungan jalan sub nasional sepanjang 500 km, termasuk disana didalamnya adalah dukungan terhadap 24 pelabuhan baru dan dukungan jalan terhadap pelabuhan penyebrangan, kemudian jalan lingkar, kemudian dukungan terhadap 15 kawasan industri, 15 dukungan untuk bandara baru, kemudian intermoda dan 25 KSPN.

Bapak Ibu semuanya, jadi kalau kita lihat detailnya lagi, kami harus meningkatkan kemantapan jalan nasional menjadi 98% kemudian, 15 Km tadi fly Over dan under pas, jadi kalau kita lihat di renstra tahun 2010 2014 hampir semuanya adalah 2 kali lipat dari renstra, semuanya Bapak Ibu semuanya.

Kemudian capaian kami hingga tanggal 8 Juli 2018 ini, kami telah berhasil membangun jalan sepanjang 2816 km, dari target 2650km jadi untuk ini kami sudah melampaui target renstra, kemudian pembangunan jembatan, dari target 29859 meter kami sudah membangun 27.172 m.

Jadi tahun 2018 ini kita akan membangun 2.747m dan 2019 10.000 jadi In Sha Allah dengan dukungan Bapak Ibu semuanya kita akan melebihi target yang ditentukan, kemudian terkait dengan jalan tol, target kami adalah 1000 km tetapi kita dengan pembangunan dan progres saat ini kita jadi ada sedikit kriteria berbeda, kalau yang non APBN kami sampaikan, sambil beroperasi, tetapi yang APBN dukungan untuk bagaimana jalan ton non APBN supaya fible adalah sampai selesainya konstruksi, jadi agak berbeda memang, kami telah membangun dan mengoperasikan sepanjang 443,6km, jadi sampai Juli ini kalau kita lihat disana adalah persis sesuai dengan rencana, dan selanjutnya di akhir tahun ini kita akan melebihi target, dan ini ditargetkan 841km dan In Sha Allah mengoperasikan 947 km, dan ditahun 2019, mengoperasikan 1852 jadi In Sha Allah kita bisa memenuhi target, target-target yang telah tugaskan kepada Direktorat Bina Marga, Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat postur anggaran, yang dipenuhi apa yang kami butuhkan dan dialokasikan hanya pada tahun 2015, selanjutnya alokasi anggaran selalu lebih kecil dari yang dibutuhkan seperti yang disampaikan bapak pimpinan, namun demikian Bapak Ibu semuanya kami tidak pernah mengeluh karena anggaran ini adalah tugas dari negara.

Untuk di pertanggungjawabkan sebaik mungkin jadi bukan omset, untuk itu ada beberapa hal strategi yang kami lakukan yang pertam adalah bagaimana kita mempertahankan jalan untuk tidak cepat rusak, salah satunya adalah kita bekerja sama dengan kementerian perhubungan dan kepolisian untuk mengendalikan over load dan over dimension, karena ini sangat merusak jalan kita Bapak Ibu semuanya.

Yang berikutnya kita memperkenalkan teknologi baru untuk sedikit memperpanjang umur jalan, salah satunya adalah supaya jalan tersebut tidak rusak, semuanya ya, yang berikutnya adalah ada jalan-jalan baru di perbatasan yang sudah kami bangun tetapi masih dapat, jadi masih timbunan, dan akan secara bertahap akan kami, beri perkerasan.

Sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang hebat di lokasi tersebut Bapak Ibu semuanya, kemudian kami sedikit mengoptimalkan pelebaran

jalan, kemudian pembangunan jalan lingkar dan fly over Bapak Ibu semuanya, kaitanya dengan pelebaran jalan mohon maaf, jadi kami tidak melebarkan keseluruhan tetapi hanya ditikungan kemudian juga menyiapkan over taking line.

Yang berikutnya kalau kita lihat dari tugas kami untuk menyelesaikan pembangunan di jalan prioritas yang pertama adalah pansela kalau kita lihat di slide 21, jadi untuk pansela ini, masih nanti ada 425 km yang belum tersambung baru, namun demikian kita linkan kepada jalur selatan yang ada, ini sebetulnya dari mulai banten sampai banyuwangi sudah terhubung, Bapak Ibu semuanya, jadi kombinasi jalan baru dan jalan lama, kemudian transpapua kami perkirakan masih ada 154 km yang belum tersambung kemudian perbatasan Papua 189 km belum tersambung, dan diperbatasan NTT alhamdulillah semuanya sudah tersambung, dan untuk perbatasan Kalimantan masih ada 227 Km yang belum tersambung Bapak Ibu semuanya.

Izinkan selanjutnya kami mengusulkan rencana kerja Dirjen Bina Marga tahun 2019, jadi prioritasnya adalah kondisi jaringan jalan nasional supaya tidak cepat rusak, kemudian melanjutkan program prioritas dibidang infrastruktur jalan, kemudian mendukung kawasan strategis berupa ekonomi khusus, kawasan industri, pariwisata nasional, kemudian outlet bandara pelabuhan, kemudian terus berupaya menuntaskan paket Renstra 2015-2019.

Jadi urutan prioritas nomor 8 Bapak Ibu semuanya yang pertama adalah ada pekerjaan program yang sudah komite yang multiyears kontrak dan penyertaan hutang luar negeri, itu mau tidak mau harus kami penuhi, kemudian reservasi jaringan jalan dilintas utama, lintas timur Sumatera Pantura Jawa, lintas selatan Kalimantan dan lintas Barat Sulawesi, kemudian menyelesaikan program prioritas nasional di perbatasan Kalimantan dan Papua, Pansela, Jalan tol akses terhadap 9, terhadap 7 kawasan industri dan 7 kawasan strategis pariwisata nasional.

Kemudian preservasi jaringan jalan nasional diluar lintas utama, jadi presercasi kami prioritaskan juga, kemudian baru menyediakan layanan perkantoran, jadi kami lakukan penghematan untuk dukungan ini Bapak Ibu semuanya.

Alokasi pagu kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, ini adalah history alokasi pagu anggaran yang slide 26 yang disampaikan tadi oleh bapak pimpinan ini berdasarkan Rapat kerja tanggal 6 Juni 2018, jadi kami untuk tahun 2019 diberi tanggungjawab untuk mengelola anggaran sebesar 39,2 trilyun.

Ditambah ada 5,1 trilyun dalam bentuk (rekaman tidak jelas), jadi itu adalah terobosan baru diperkenalkan pertama kali, (rekaman tidak jelas).

Ini Bapak Ibu semuanya, agremen ini adalah kita bekerjasama dengan penyedia jasa, Pemerintah diminta untuk membangun dalam waktu 2 sampai 3 tahun, kemudian kami akan mencicilnya dalam 15 tahun, jadi disitu ada periode dan keuntungannya adalah keuntungan masyarakat bisa langsung

cepat memanfaatkan, (rekaman tidak jelas) Bapak Ibu semuanya dan alhamdulillah penyedia jasa sangat tertarik melihat ini kami harapkan sistem inovasi akan lebih efisien dan mendorong jasa konstruksi investasi (rekaman tidak jelas).

Terkait dengan payment ini akan digunakan untuk reservasi jalan lintas timur Sumatera ini provinsi Riau dan Sumsel, tahun depan ini dialokasikan 1,1 trilyun kemudian pembangunan jalan trans Papua, dari Wamena ke (rekaman tidak jelas) sebesar 1,9 trilyun jadi untuk mendukung bahwa satu harga semen, satu harga (rekaman tidak jelas) dan lain-lain ini bisa percepat jadi akan membangun menggunakan e payment ini, kemudian untuk mengganti jembatan di pulau Jawa, jadi masih banyak jembatan yang sempit dan kemudian sudah tua, dan kita ganti, kita anotasikan menjadi 0,8 trilyun.

Kemudian reservasi jalan di lintas tengah pulau Sumatera, sebesar 2,4 trilyun Bapak Ibu sekalian.

Disektor anggaran di Direktorat Bina Marga, disektor anggaran kalau kita lihat ada 29 trilyun menggunakan rupiah murni, kemudian 2,1 trilyun, kemudian ada 3,3 milyar pendapatan negara bukan pajak, kemudian 22 milyar BLU dan bersumber pada SBSN sebesar 7,8 trilyun Bapak Ibu semuanya.

Kemudian dana tersebut kami alokasikan untuk di slide 30 bisa kita lihat Bapak Ibu semuanya, untuk reservasi jalan 47,86% kemudian reservasi jembatan 10,54% Bapak Ibu semuanya jadi untuk pemeliharaan dikurang 57% Bapak Ibu semuanya, totalnya.

Untuk peningkatan jalan 4,32% peningkatan jembatan 0,8% kemudian untuk pembangunan infrastruktur baru 24,28% dan belanja fisiknya nambah, jadi untuk perencanaan dan pengawasan sebesar 6,41% jadi total 94,23% yang berikutnya adalah dukungan dari belanja untuk dukungan tupoksi 5,57% didalamnya untuk belanja pegawai, belanja barang operasional, itulah postur anggaran.

Kemudian izinkanlah kami menyampaikan proyek strategis direktorat jendral bina marga Bapak Ibu semuanya, jadi kalau kita lihat sebaran proyeknya dalam peta ini ada 7 kawasan industri yang kami programkan disini ada (rekaman tidak jelas) kemudian, (rekaman tidak jelas)

Kemudian ada 9 kawasan ekonomi khusus mulai dari loksumawe, tanjung api-api, kepulauan seribu, tanjung lesung, Bitung, morotai dan Sorong Bapak Ibu semuanya, dan 7 kawasan strategis pariwisata nasional, itu Danau Toba, kemudian Tanjung Layat, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Waktobi itu semuanya, kemudian mereka strategis di Bina Marga kalau kita bisa diizinkan, jadi (rekaman tidak jelas). Ada yang proyek strategis nasional, untuk jalanan non tol adalah pembangunan jalan lingkaran trans morotai, rekonstruksi dan realignment, jalan (rekaman tidak jelas) kemudian pembangunan 7 ruas, jalan Trans Maluku, kemudian ada 4 jalan tol, yang harus dibangun oleh Pemerintah sebagai bagian, jadi ini adalah PGM, yang harus dibangun Pemerintah, itu pada ruas Cilenyi, Sumedang, Daunan,

kemudian ruas Balikpapan Samarinda, Manado, Bitung dan Serang, kemudian akses pelabuhan dari prioritas yaitu dimulainya akses terhadap pelabuhan di Jawa barat.

Pemeliharaan lintas utama, lintas timur Sumatera, lintas pantai utara Jawa lintas Selatan Kalimantan, lintas barat Sulawesi, kemudian akan kami alokasikan juga untuk menyelesaikan lintas perbatasan Karimata, lintas perbatasan Papua, kemudian akses KSPN kawasan ekonomi khusus, kawasan industri prioritas, seperti yang kami sebutkan tadi, kemudian juga akses terhadap daerah tertinggal itu pantai selatan Jawa dan Trans Papua, Bapak Ibu semuanya, karena dana yang dialokasikan kepada Direktorat Jendral Bina Marga adalah yang terbesar, kemudian kasus yang kita, Bapak Ibu mengetahui semuanya, jadi saat ini, kami disupervisi oleh KPK dalam kaitannya *good governance* dari Bapak Ibu semuanya, sebab ini terkait dari mulai pemograman, perencanaan, pelaksanaan lapangan dan evaluasi *output* maupun *outcome*, termasuk didalamnya adalah pengembangan jasa konstruksi dan SDM kaitannya buat mendukung Bapak Ibu semuanya, jadi dan semuanya sudah mulai diterapkan dan ini untuk 3 tahun kedepan, karena berdasarkan pemetaan jadi sudah ada potensi kebocoran kemudian juga korupsi, jadi izinkan kami melaporkan hal ini, jadi untuk memperbaiki *governance* dia di Direktur ada masalah pinjaman, dan kemudian, *preference strategis* yang kami tampung, berdasarkan masukan dari anggota Komisi V DPR RI yang kami muliakan bisa dilihat dimasing-masing, yang pertama adalah pulau Sumatera kalau kita lihat disana kita masukan mohon dikoreksi kalau ada yang masih terlewat Bapak Ibu semuanya.

Kalau kita lihat di provinsi Aceh, bisa dilihat disana, kemudian di Sumatera Utara semuanya kemudian Sumatera Barat ada 3, kemudian di provinsi Riau ada 10, di kepulauan Riau ada 3 strategis, kemudian di Jambi ada 7 program bisa dilihat disana, kemudian Banka Belitung ada satu, kemudian di Sumatera Selatan ada 6, kemudian di Bengkulu ada 2 mereka strategis disana bisa diikuti, kemudian di Lampung ada 4, di Pulau Jawa Bapak Ibu semuanya yang pertama adalah pembangunan Pantura untuk mendukung jalur logistik ini kita perkuat semuanya, kemudian Pansela dan jalan akses ke Bandara Kertajati dan pelabuhan...

Kemudian pembangunan lingkaran dan akses ke Jati Gede, kemudian Banten disini ada tiga, kemudian di Jawa Barat sendiri, ada 7 kegiatan, kami mohon izin tidak membaca detailnya, supaya bisa dilihat, kemudian Jawa Tengah ada 5, kemudian di daerah istimewa Jogjakarta ada 5 juga, kemudian di Jawa Timur ada 11, kemudian di Bali Nusatenggara ada 1, kemudian di Nusa Tenggara ada 4 Bapak Ibu semuanya, Barat ada 1 Nusa Tenggara Timur ada 1, yang berikutnya di Nusa Tenggara Timur, di NTT ada 1 pembangunan lingkaran luar kota Kupang, dan selanjutnya di pulau Flores ada dua kegiatan kemudian di pulau Kalimantan disini secara umum adalah di pulau Kalimantan adalah percepatan pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan.

Kemudian membangun missing link di provinsi Kalimantan Barat dan Tengah, dan reservasi lintas selatan Kalimantan, kalau kita lihat perpropinsinya Kalimantan Barat ada 5, kegiatan prioritas di Kalimantan

Tengah ada 3, Kalimantan Timur ada 7, di Kalimantan Utara ada 9, kegiatan prioritas, Kalimantan Selatan ada 3, kemudian di pulau Sulawesi, kebijakan umumnya adalah proyek strategis, yang pertama adalah di pulau Sulawesi adalah menyelesaikan paket-paket yang komited, kemudian pembangunan akses terminal bandar pelabuhan kemudian peningkatan layanan lalu lintas, reservasi lintas barat untuk Sulawesi untuk mendukung logistik dan perbaikan geometri, detailnya Sulawesi Utara ada dua kegiatan strategis di Gorontalo ada dua, kelihatan strategis, di Sulawesi Tengah ada dua kegiatan strategis, di Sulawesi barat ada dua juga, kemudian di Sulawesi Selatan ada 5 kegiatan strategis, kemudian Sulawesi Tenggara ada dua, selanjutnya di Kepulauan Maluku Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama adalah jalan pembangunan untuk mendukung PN pulau Morotai.

.... Perbaikan Trasa Maluku, kemudian di pulau Seram, ada 3 dan di Pulau Tanibar ada satu kegiatan di istana dan di pulau Maluku ada dua program strategis nasional, di pulau Papua Bapak Ibu semuanya secara umum pendekatan ini adalah percepatan pembangunan dan peningkatan kondisi jalan di trans koridor Trans Papua, percepatan pembangunan jalan di perbatasan Papua dan Papua Barat, konektivitas jalan dan jembatan menuju perbatasan (rekaman tidak jelas) kemudian proyek KPPU atau ... payment pembangunan trans Papua, ruas Wamena maupun di provinsi Papua sendiri ada 13 proyek strategis nasional kemudian di Papua Barat ada 3 strategis nasional.

Secara garis besar Bapak Ibu semuanya itu adalah pembangunan, yang lainnya kaitanya dengan preservasi jalan, kemudian prservasi jmebatan tidak kami sebutkan secara spesifik karena itu memang harus kali lakukan dan menjadi perhatian utama kami karena anggarannya cukup besar, lebih kurang totalnya 57% dari anggaran Direktorat Jendral Bina Marga, demikian pimpinan saya tidak membacakan detailnya, per provinsi, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Dirjen Bina Marga, ini kita sudah mendapatkan paparan dari pandangan Pemerintah terutama berkiatan dengan program strategis yang ditawarkan didaerah-daerah termasuk didaerah pemilihan kita, kita harapkan nanti pemaparan berikutnya pak Dirjen, apa yang disampaikan oleh anggota, baik yang disampaikan langsung dalam Rapat kerja ini, maupun nanti ada yang menyampaikan secara tertulis itu harus masuk dalam pemaparan pak Dirjen yang bisa di dorong mana yang masih harus disinkronisasikan, karena saya kira rapat untuk mendengarkan pemaparan, pikiran dari Pemerintah seperti ini, dan untuk itu maka para anggota-anggota akan menyampaikan berberapa program-program yang akan disampaikan baik dari hasil kunjungan kerja maupun dari hasil kunjungan perorangan didaerahnya masing-masing, kita akan ketemuan lagi setelah nota keuangan Presiden, dan itu sudah harus seperti dulu pak, sudah harus disampaikan usulan daerah pemilihan ini, atas usulan dari Komisi V DPR RI mana yang bisa masuk dan mana yang perlu disinkronisasikan.

Ini pak Dirjen kelimanya mendengar dan tidak perlu banyak usulan, lebih banyak menerima usulan, kita tidak perlu banyak berdebat disini pak, itu saja untuk hari ini, selanjutnya kita berikan kepada pak Dirjen Bina konstruksi, silakan.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI:

Terima kasih bapak pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati.

Bina Konstruksi pada tahun 2018 telah mendapatkan dana dan dialokasikan dana sebesar 338,72 milyar dan pada saat ini status fisiknya sudah 91,25% dan keuangan kurang lebih 39,73%. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati kondisi sekarang ini secara keseluruhan tenaga kerja konstruksi berdasarkan BPS itu kurang lebih 8,1 juta tenaga kerja konstruksi, sementara berdasarkan data LPJK jumlah tenaga kerja yang sudah memiliki sertifikat secara keseluruhan masih dibawah 6% sehingga kalau kita melihat masih terlalu besar gap antara yang bersertifikat tidak memiliki sertifikat.

Bahkan kalau kita mau menguraikan, memang tenaga kerja kita ini lebih banyak yang dibawa SMA, yang kedua persoalan yang dihadapi kedepan juga menghindari terjadinya kecelakaan konstruksi, sehingga yang menjadi tugas bina konstruksi adalah disamping SDM nya juga melakukan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai resiko tinggi.

Selanjutnya juga kami laporkan bahwa kalau kita melihat jumlah alokasi dana yang ada di PUPR maka menurut hasil kajian Pustrap BUPN setiap satu trilyun itu memerlukan tenaga kerja kurang lebih 12.000, oleh karena itu kalau kita melihat jumlah dana yang dialokasikan di tahun 2018 dalam bentuk kontrak yaitu 71 trilyun maka sesungguhnya tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan selama satu tahun untuk kegiatan APBN kurang lebih 994 ribu, sementara yang memiliki sertifikat berdasarkan data yang kami sampaikan tadi hanyalah 470.789, kita masih mempunyai gap kurang lebih 523 ribu yang tidak memiliki sertifikat sehingga ini menjadi program kedepan.

Kemudian disamping itu, salah satu prioritas yang dilakukan juga tahun ini dan seterusnya adalah bagaimana melakukan pembinaan tertib terhadap penyelenggaraan konstruksi dan juga pembinaan SDM konstruksi di ke PUPR an sehingga sampai saat ini ditahun 2018 itu sudah hampir mencapai 40% dari jumlah Satker yang ada di PUPR, satker yang ada di PUPR kurang lebih 700 satker, sehingga tahun 2019 kita berharap bisa mencapai kurang lebih 280 satker yang dilakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan konstruksi, kemudian program utama kami untuk tahun 2019 yang pertama dengan menjawab persoalan-persoalan yang ada, dilakukan peningkatan dan pelatihan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yang kedua mempercepat sertifikasi terhadap asosiasi pengembang, yang selanjutnya meningkatkan upaya pencegahan terhadap kecelakaan konstruksi dengan melakukan peningkatan terhadap komite K2, yang keempat pembentukan ULP secara

mandiri, yang pertama belum terealisasi sesuai dengan Undang-undang yang ada.

Dalam rangka melakukan konsultasi kepada daerah juga dan untuk satker dilakukan klikik konstruksi di setiap provinsi, kemudian yang yang keenam pembentukan lembaga jaskon baru berdasarkan Undang-undang jaskon, dan yang terakhir dalam rangka peningkatan pelatihan, maka diadakan beberapa alat berat yang selama ini juga merupakan bagian pelatihan yang belum terpenuhi dengan peralatan-peralatan yang terbaru oleh karena itu kronologi anggaran 2018-2019 yang tadinya atau tahun ini kurang lebih 338 milyar maka dengan melihat kondisi kedepan alokasi dana ditingkatkan menjadi 526,17 milyar ada kenaikan kurang lebih 55% hal ini tentu diharapkan semua prioritas tadi bisa terealisasi termasuk didalamnya meningkatkan bagaimana sertifikasi yang selama ini masih besar gapnya, begitu juga akan dilakukan tertib penyelenggaraan klinik konstruksi, ini adalah hal yang baru juga yang selama ini dianggap dibutuhkan baik dari daerah ataupun juga dari APBN yang ... langsung oleh PUPR, ada program juga yang diharapkan oleh pak Menteri itu, bagaimana peningkatan 1000 insinyur dalam rangka tenaga ketiga.

Juga sudah dilakukan persiapannya dan kita berharap pada tahun 2019 bisa tercapai, selanjutnya juga dilakukan bagaimana peningkatan-peningkatan target layanan terhadap jasa konstruksi baik dipusat maupun di daerah, sehingga penyebaran tenaganya bukan hanya di pusat saja, tetapi juga di daerah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, stakeholder pelatihan dan sertifikasi ini menyangkut delapan komponen, pertama bagaimana Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi bagian dari pelatihan dan sertifikasi, ini juga dari kementerian dan juga kemudian lebih khusus usulnya Direktorat Jenderal, baik a,b,c kemudian dari LPJK, juga dilakukan kerjasama sertifikasi, termasuk juga badan usaha jasa konstruksi baik kecil menengah besar, kemudian juga salah satu stakeholder pelatihan sertifikasi adalah asosiasi profesi dan badan usaha, bahkan perguruan tinggi teknik dan menengah kejuruan juga menjadi bagian dari program pelatihan sertifikasi, dan yang terakhir tentu dari masyarakat konstruksi itu sendiri, disamping itu ada beberapa stakeholder yang selama ini sudah dilakukan, yang pertama adalah program yang terkait dengan ke PU an sendiri, kemudian program dari cipta karya, kemudian yang mahasiswa universitas juga sudah dilakukan SMK, mahasiswa, badan usaha kecil Pemerintah daerah bisa sampai dengan infrastruktur yang berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan tahun 2019 ditargetkan kurang lebih 197.000 tenaga yang tersertifikasi termasuk didalamnya pelatihan, ini ada peningkatan, yang cukup signifikan dengan adanya penambahan dana yang ada dan juga melibatkan stakeholder sehingga bukan hanya sertifikat dilakukan oleh Pemerintah pusat saja tetapi seluruh stakeholder terkait didalamnya.

Yang perlu kami laporkan terakhir pada Bapak Ibu yang saya hormati adalah menyangkut masalah pembentukan kelembagaan, salah satu amanah Undang-undang nomor 2 adalah adanya lembaga baru, pengganti lembaga pengembangan jasa konstruksi, tahun ini sudah di proses mulai dari

regulasinya sampai dengan mekanisme-mekanisme pelaksanaannya, sehingga kedepan tahun 2019 kita berharap sejak mulai Januari LPJK baru sudah ada dan ini tentu harus melalui konsultasi dengan anggota dewan yang terhormat, sehingga pada saatnya nanti kami laporkan kepada anggota dewan, program yang terkait dengan pembentukan lembaga, saya kira itulah yang ingin kami laporkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Dirjen Bina Konstruksi, ini pak Dirjen ini apa juga harus perkenalkan ini balai-balainya karena ini nanti setelah satu usulan kami itu adalah bapak harus buat banyak kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan mengundang masyarakat umum, dan bapak wajib untuk menghadirkan anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan pemahaman terhadap K3, atau kecelakaan konstruksi, kan kita belum tahu ini program bapak berkaitan dengan pelatihan-pelatihan dengan menghadirkan masyarakat umum tentang keselamatan konstruksi, itu dimana saja, dan kalau bisa nanti anggota DPR Komisi V DPR RI juga bisa mengusulkan.

Untuk itu mungkin kepala-kepala balainya perlu di perkenalkan pak, pada kita.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI:

Baik bapak pimpinan.

Yang pertama kami ingin melaporkan bahwa balai-balai yang hadir pada hari ini adalah balai-balai yang ada di Jakarta, ada 3 balai, tetapi yang melakukan pelatihan didaerah-daerah itu mulai dari satu di Aceh, kemudian balai dua di Palembang, jadi di Sumatera ini dibagi dua balainya, kemudian di Jakarta wilayahnya Jawa Barat, Banten sampai dengan DKI, kemudian yang empat adalah berkedudukan di Surabaya wilayahnya Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Bali dan NTT.

Kemudian wilayah 6 sulawesi secara keseluruhan kemudian wilayah 7 Papua, yang satunya lagi wilayah Kalimantan jadi ada 7 balai yang terkait dengan pelatihan, kemudian ada dua balai yang menyangkut masalah peralatan, dan satunya menyangkut masalah teknologi, yang hadir pada hari ini adalah balai Jakarta, kemudian balai yang menangani masalah teknologi bahan bangunan, dan yang terakhir mengenai peralatan, materian dan peralatan, kedepan saya kira memang salah satu program kami, yang kami laporkan kepada pak Menteri adalah penguatan balai, penguatan pertama itu adalah bagaimana balai itu berfungsi sebagai pembinaan terhadap konsultasi-konsultasi didaerah terhadap konstruksi, salah satunya bahkan ULP saat ini ULP itu ada di bina konstruksi, kedepan balai-balai itu akan berfungsi sebagai ULP karena sifatnya akan mandiri, sekarang ini ULP masih dibalai pelaksana, sehingga untuk independensinya itu harus ada laporan yang netral sehingga program kita adalah ULP mandiri yang ada di balai yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan fisik.

Saya kira demikian kami laporkan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih pak Dirjen, pak Dirjen pikirkan itu dari target pembinaan SDM konstruksi itu nanti kita mau mendapatkan gambaran itu berapa banyak terus dimana saja, dan bapak harus bisa sebagaimana kita punya Rapat kerja dengan pak Menteri, bagaimana bapak bisa memberikan informasi kepada anggota, sehingga anggota Komisi V DPR RI itu bisa hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat konstruksi di daerahnya masing-masing itu sebanyak-banyaknya, bisa ditangkap pak ya, itu tanggung jawabnya pak Dirjen, baik saya kira kita sudah mendengarkan pemaparan dari pak Dirjen Bina Marga dan Dirjen Bina Konstruksi, selanjutnya kami beri kesempatan kepada anggota tadi sudah saya jelaskan bahwa hari ini saya sudah mendengarkan program-program strategis yang disampaikan dari sudut pandangan Pemerintah, sekarang kalau anggota-anggota Komisi V DPR RI ada yang ingin disampaikan baik secara langsung maupun tertulis, itu kami persilakan ini ada 27 anggota hampir semuanya ingin bicara.

Saya kira kita akan beri kesempatan kalau 25 anggota menyampaikan pokok pikirannya mungkin, karena kalau berbicara tentang usulan dan pandangan-pandangan langsung saja, kalau dirasa panjang bisa saja disampaikan secara tertulis, langsung saja diserahkan, untuk itu maka sebagaimana biasanya kami akan beri kesempatan anggota yang lebih dulu mengabsen, yang pertama, kepada pak Yosef Umar Hadi, siap-siap pak Ade Rizki Pratama, kami persilakan.

F-PDIP (Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.):

Terima kasih ketua.

Pimpinan yang kami hormati dan Bapak Ibu rekan-rekan anggota yang kami hormati.

Pak Dirjen, Dirjen Bina Marga, Dirjen Bina Konstruksi dan seluruh jajaran Bina Marga dan Konstruksi yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya diberi kesempatan yang pertama ada beberapa masukan pada pak Dirjen Bina Marga yang saya hormati.

Yang pertama saya akan menyinggung terlebih dahulu dengan jalan tol, tentu menyampaikan apresiasi kepada prestasi dan kinerja Pemerintah yang telah memberikan kinerja yang sangat positif dan dirasakan betul oleh masyarakat tentang keberadaan jalan tol yang cepat bisa diselesaikan, sangat membantu untuk perjalanan arus mudik dan arus balik lebaran. Meskipun belum nyambung seluruhnya pada tahun ini kami berharap di 2019 sebagaimana di targetkan nanti sekitar 900 km itu bisa tersambung dengan cepat dan baik.

Ya memang, saya kira ini menjadi satu kinerja yang perlu kita apresiasi dan menjadi wajah dari Pemerintah sekarang, didalam rangka pembanguann

infrastruktur yang berhasil, namun tentu saya ingin memberikan masukan terkait dengan ini, terutama kepada badan jalan tol, saya melihat bahwa koordinasi dan bekerjasama antara (rekaman tidak jelas) dan Komisi V DPR RI ini tidak terlalu dekat seperti tahun yang lalu, dimana saya merasakan, artinya kita tidak bisa atau mungkin secara personal dan pribadi komunikasi itu cukup baik tetapi ini hampir kita tidak pernah mendapatkan pemaparan kinerja. Terutama dari sisi pelayanan dan penyelenggaraan jalan tol itu sendiri, dari pembangunan maupun dari tiap kali kita menghadapi apa, kenaikan-kenaikan jalan tol yang memang sesuai dengan Undang-undang setiap 2 tahun sekali.

Padahal kita memerlukan satu informasi dari kita saya kira untuk menjadi perbaikan dalam rangka pelayanan sebelum kenaikan jalan tol kita berikan kesempatan untuk bisa menyesuaikan inflasi dan sebagainya tentu diikuti dengan kondisi pelayanan, terutama terkait dengan kerusakan dan kerataan jalan itu sendiri, karena kita sering melihat bahwa kenaikan itu tidak diimbangi dengan perbaikan pelayanan, ini saya kira mungkin BPJD (rekaman tidak jelas).

Terkait dengan hitung ulang, terutama terkait dengan pembangunan pak ya, dari BPJT atau wakilnya, itu banyak jalan tol yang dibangun tanpa memperhatikan aspek lingkungan pak, ini yang terjadi terutama di wilayah Cirebon, Indramayu dan Brebes.

Banjir yang terjadi selama ini bukan karena persoalan sungai yang meluap, dan selama ini pun sebenarnya ketika jalan tol dibangun itu bisa mengalir dengan baik, cepat kering, tetapi ketika jalan tol ini dibangun maka sering saya mendapatkan keluhan dan demo dari masyarakat saya kira mungkin pak ... pernah merasakan itu, demo dari masyarakat itu, terutama di ... sudah di Cirebon Indramayu, saya mohon beberapa titik, saya mohon beberapa titik, saya lupa persis dimana tetapi saya memiliki data yang memiliki foto-foto dan kunjungan langsung kelapangan mohon ditinjau dalam bentuk banyaknya gorong-gorong dan sempit, bahkan menutup yang sebenarnya dulu air bisa mengalir kebagian, kearah laut, ini saya kira ini untuk mendapatkan bagian untuk dari sisi lingkungan, ini saya sampaikan sekaligus kepada pak Dirjen agar nantinya didalam pembangunan yang masih terus berlangsung memperhatikan aspek itu, didaerah-daerah lain, bukan didaerah saya, didaerah pemilihan saya.

Jadi yang pertama soal koordinasi dengan kita dengan DPR, tentang informasi ruas mana saja yang akan naik, kenaikan itu harus dibagi dengan peningkatan pelayanan dan kondisi kerataan jalan, ini perbaikan jalan, itu untuk jalan tol, jalan tol ini, tentu sebenarnya kita harapkan terutama di Jawa itu lebih banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan pribadi bukan logistik, saya tidak tahu kenapa pak Dirjen, terutama di wilayah pantura didaerah saya di Cirebon Indramayu itu logistik lebih banyak menggunakan jalur reguler atau jalur nasional, Pantura, dan itu juga lalu menjadi penyumbang kerusakan jalan yang cukup besar karena muatan-muatan mereka berlebih.

Sehingga persuasi jalan ini selalu menghabiskan jalan yang cukup besar, apakah memang dari sisi manajemen lalu lintas saya tidak

memungkinkan untuk memasuki jalan tol, kenapa mereka lebih suka dijalan, jalan biasa, jalan nasional di Pantura itu.

Karena itu betul-betul menjadi penyumbang kerusakan yang besar, dari sisi beban muatan yang berlebih tadi, maka tentu pak Dirjen saya kira perlu ada solusi untuk itu, termasuk diantaranya persevasi yang selama ini cukup besar bagi wilayah itu, hampir setiap tahun kita membutuhkan dana dan anggaran yang sangat besar.

Saya berharap ini juga menjadi perhatian, juga diwilayah Pantura ini, banyak sekali gorong-gorong yang tidak sesuai dengan spesifikasi jalannya, jadi juga banyak banjir di Pantura soal gorong-gorong yang sempit juga, tidak hanya di jalan tol, diwilayah saya itu, ada 7 titik saya mati itu ada banyak gorong-gorong yang sempit, misalnya (rekaman tidak jelas) kemudian didaerah (rekaman tidak jelas) itu banyak gorong-gorong yang sempit itu di musim hujan itu banjir diwilayah sebelahnya tolong juga mendapat perhatian, saya tahun yang lalu sudah menyampaikan titik-titik dimana gorong-gorong tersebut sangat sempit tadi, untuk jembatan gantung ini pak Dirjen kami sangat bersyukur dan berterima kasih, dimana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan ... politik yang sangat baik bagi kita dan mungkin tidak hanya bagi kita bagi Pemerintah juga, karena banyak daerah-daerah yang terputus komunikasinya dan membutuhkan waktu dan perjalanan yang cukup panjang, sehingga jembatan gantung ini kita berikan dukungan politik yang cukup baik untuk dikembangkan, maupun di perbanyak kalau bisa, tetapi kenapa justru tahun 1999 malah semakin berkurang, apakah, kala kita sepakat untuk ditingkatkan, apakah anggarannya lebih besar, lebih khusus terkait dengan tahun 2019 ini tahun politik yang sangat penting, baik tidak hanya untuk Pemerintah maupun untuk DPR, saya kira tidak ada salahnya untuk dipikirkan kembali mungkin bisa ditingkatkan jumlahnya sehingga alokasi untuk rekan-rekan anggota ini paling tidak untuk tetap di pertahankan seperti tahun lalu, yaitu masing-masing 2 jembatan, karena ini betul-betul langsung terkait dengan hajat hidup rakyat kecil ya.

Petani, anak sekolah, ibu-ibu dan sebagainya, saya ingin tahu sampai dimana penyerapannya pak, karena sudah bulan Juli ini kita belum melihat ada tanda-tanda kapan ini dibangun, terutama didaerah saya ada dua jembatan yang saya usulkan tetapi apakah memang baru selesai, baru masuk ketahapan pemenang tendernya saya tidak tahu diberikan informasi supaya kepada masyarakat kita selalu menjawab pak.

Kemudian, mengenai jalan perbatasan dan jalan pantai selatan, jadi Pansela ini Komisi V DPR RI saya kira memberikan dukungan penuh untuk Pemerintah supaya segera dapat diselesaikan karena potensi untuk ekonomi baik pariwisata maupun yang lain dan banyak, sekarang ini mulai diwilayah selatan bandara maupun juga tadi wisata dan pelabuhan-pelabuhan, maka tidak banyak pertanyaan kecuali kita dukungan program saja untuk banyak program pantai selatan ini, dan perbatasan saya belum mendapatkan informasi, progresnya apa saja, progres perbatasan ditahun eh hingga saat ini ya.

Kemudian yang terakhir untuk pak Dirjen Bina Marga, saya mohon barangkali tahun ini dapat dilakukan survei terkait dengan kemacetan di kota Cirebon pak, ini terkait dengan tidak bisa ditanah lagi kondisinya karean dengan adanya jalan tol maupun bandara dan kereta api, ibu kota Cirebon itu menjadi kota tujuan yang sangat pesat, sehingga kemacetan terjadi dimana-mana, saya mengusulkan untuk fly over di jembatan kereta api di jalan kartini, nanti barangkali ada alokasi atau anggaran dilakukan kira-kira disurvei apakah bisa diusulkan atau dibangun fly over, kemudian untuk pak Dirjen Bina Konstruksi sependapat dengan pak ketua tadi, saya kira peran dari konstuksi sangat penting terutama terkait dengan banyaknya kecelakaan, dan disitu pak Dirjen sudah melaporkan kepada kita dimana masalah utamanya adalah kurangnya kedisiplinan dalam rangka operasional, maupun juga tidak adanya konsultan pengawas dan sebagainya, maka peran strategis dari direktorat Jendral Bina Konstruksi ini, belum lama didalam upaya kita untuk semakin mengurangi tingkat kecelakaan, memerlukan langkah-langkah yang proaktif dan yang baik.

Kita ikut prihatin dimana banyak sekali tenaga kerja yang belum sertifikat, mudah-mudahan mulai tahun depan sudah banyak yang sudah tersertifikasi, dan tentu kita juga berharap nantinya kita dilibatkan didalam pemberian pengarahan dan pembinaan kepada mereka, mungkin dipengantar atau disambutan ketika berada didapil kita juga penting pak, itu sekaligus juga memberikan dukungan kepada kinerja bapak juga kita saling mendukung untuk kepentingan kita di dapil kita masing-masing.

Saya kira tidak banyak itu saja pak ketua, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Yoseph.

Silakan pak Rezky, siap-siap pak Ridwan, ada?

ADE REZKY:

Terima kasih pak ketua.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI.

Yang kami hormati juga pak Dirjen Bina Marga dan DirjenBina KONstruksi beserta para Direktur dan jajaran.

Langsung saja pak Dirjen pada saat pembahasan kali ini 2019 ini adalah tahun setahun setelah terakhir masa kepemimpinan Presiden dan (rekaman tidak jelas), ini akan memperlihatkan bagaimana selama 5 tahun renstra-renstra tersebut benar-benar dapat sesuai dengan target ataupun jauh dari target atautkah ada yang melenceng dari target yang sudah di prioritaskan, seperti yang kami lihat tentunya lihat sendiri pak. Ini kalau kita berbicara nasional, sekarang ini saya lagi ingin melihat dari perspektif setelah

dibangunnya sebuah jalan, bagaimana keberadaan jalan itu memang isinya sangat penting, sangat luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi disisi lain, memang jalan ini setelah dibangun, ternyata banyak lagi yang di poll daripada dampak penggunaan transportasi jalan tersebut, ataupun hal-hal lain, baik berupa alam dan lainnya.

Kami melihat pak Dirjen jadi bagaimana tadi kalau lihat dari paparan bapak usulan rencana kerja, Dirjen Bina Marga tahun 2019 point pertama, menjaga kondisi jaringan jalan nasional, agar memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, terutama memberikan jalur utama logistik, kalau kita berbicara tentang transportasi, juga, dan bagaimana ini kebutuhannya untuk meringankan atau menekan biaya logistik ini dibangun oleh jalan, apakah jalan nasional, jalan tol atau bebas hambatan, yang akhirnya ini menimbulkan banyak masalah, apakah ini perlu itu sebuah permasalahan kompleks tidak hanya di PU sendiri, tetapi di perhubungan bagaimana kendaraan-kendaraan yang membawa logistik kesatu tempat dan tempat lainnya itu pada saat sekarang ini memiliki dampak yang luar biasa, pada akhirnya bapak juga yang akan capek sendiri, setiap tahun anggaran dinaikan-dinaikan, kebutuhannya terus naik, tetapi disisi lainnya ya, kadang-kadang kita terbatas dari segi penerimaan yang akan membuat terjadinya backlog, apakah kecil sedang atau tinggi.

Kalau kita melihat sekarang pak, jalan-jalan baik semuanya, tetapi tidak ikuti dengan implementasi, (rekaman tidak jelas) akhirnya banyak juga yang bermasalah, jadi ini banyak juga efek dari jalan tersebut, apakah itu jalan berlubang, terkait juga dengan reservasi jalan pak Direktorat, kalau kita melihat lagi pak dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Undang-undang tentang jalan ini, kalau kita lihat disitu rinci sekali pak, sampai kalau ada ada jalan itu berlubang, apakah itu lebih dari 10 cm, kedalamannya berapa, apakah itu ada drainasenya, apakah ada bahu jalannya, sesuai ngak dengan spesifikasinya, sesuai tidak dengan standar apa ya yang dijabarkan oleh Undang-undang tersebut.

Saya pikir ini cukup berbahaya pak sesuai tidak dengan standar apa ya, yang dijabarkan oleh Undang-undang tersebut, kami pikir ini cukup berbahaya karena disitu dijelaskan semuanya, karena disitu adalah sesuatu yang panjang sekali pak, kompleks jalan bagus tetapi tidak bertahan lama, karena banyaknya kendaraan yang melebihi daripada kemampuan jalan itu sendiri dalam menreima beban tersebut, akhirnya bapak preservasi jalan kembali itu pemeliharaan kembali, apakah itu pemeliharaan, dan rekonstruksi kembali, jadi ini sesuatu yang tidak pernah terselesaikan pak di bahu jalan, rusak lagi retak lagi, akhirnya menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru.

Dan pada akhirnya kalau kita bicara pak, ini bagaimana reservasi jalan, saya tidak tahu apakah mantap atau itu sifatnya seragam atau apa, itu dinilai oleh internal bapak kan ya, itu seperti apa, karena pada akhirnya jalan-jalan ini banyak pak menimbulkan korban, apakah korban itu karena kelalaian daripada masyarakat dalam berkendara, atau memang kendaraan tidak sesuai dengan layak untuk berjalan, pada akhirnya bila kita tidak prepare tidak siap, maka disitu bapak bisa dituntut oleh masyarakat, kenapa kadang-kadang ada jalan yang mungkin keberadaan balai bisa di ... dan vital untuk

memonitor kepada jalan nasional, jika ada tidak termonitor sedikitpun dalam 7 hari, kalau ada yang lubang atau retakan itu bisa diperbaiki, masyarakat bisa dengan mudah atau masyarakat paham untung saja masyarakat kita ini tidak terlalu paham pak dengan Undang-undang ini, kalau paham bapak dituntut habis sampai ke polisi lagi.

Ganti rugi lagi, ini yang kami harapkan bahwa tentunya Bina Marga ini adalah Direktorat Jendral yang porsi-porsinya paling besar di PUPR, jadi memang rambu-rambu, kesalahan-kesalahan yang kecil jangan dianggap itu sesuatu yang kecil juga, karena efek dan dampaknya akan luar biasa nantinya itu harapan saya, reservasi jalannya pak Direktur.

Seterusnya, kami ingin melihat pak dari beberapa kunjungan yang lalu baik pak Menteri maupun pak Presiden ke Sumatera Barat, itu ada ground breaking kemarin, jalan tol Padang Pekanbaru, Jalan tol Padang Pekanbaru ini saya melihat dan membaca dan mendengarkan daripada media-media lokal disana pak, bahwa (rekaman tidak jelas) itu menimbulkan masalah pak, yang ruasnya adalah (rekaman tidak jelas).

Jadi itu setelah itu jadi memang yang di ground breaking hanya sekian persen tetapi pada akhirnya menimbulkan efek tanah yang tidak jelas kepala daerah juga hanya memberikan garansi bahwa apakah (rekaman tidak jelas) pada akhirnya jadi masalah pak, inilah sebelum ground breaking itu terjadi bapak harus benar-benar preparing 100% jangan sampai ini nanti menimbulkan kesalahan juga pak bertanya-tanya bapak juga yang akan rugi nanti, kementerian bapak juga, terus itu yang kami ingin sampaikan mengenai jalan tol itu, berikutnya adalah kami ingin menjelaskan kepada pak Sekjen juga pasti dijelaskan oleh kepala (rekaman tidak jelas) bapak Saiful disini, ini adalah ruas jalan terpadat di Sumatera Barat, itu adalah ruas jalan Padang, Bukit Tinggi dan kota bukit tinggi ke Padang, ini adalah jalur lama sejak jalur Belanda pada jaman dahulu, ini pak sesuai pada akhirnya dinamika perkembangan saat ini, pada akhirnya apakah itu jalan yang tidak berkembang, tetapi kendaraanya semakin pesat, ataupun masyarakatnya semakin pesat ada beberapa titik titik yang ini menjadi spot yang menjadi sesuatu yang luar biasa, pak Menteri juga waktu itu pak Saifulah bicara sama saya Pak Fahri, diruas Bukit Tinggi itu ada yang namanya pasar kota baru, pasar kota baru ini, ini sudah sekian lama pak terjadi itu memang atas imbas pasar.

Atas imbas pasar yang tumpah ruah, ini adalah pasar sejak zaman dahulu kala, itu kami minta kiranya cepat pak, apakah itu dibangun fly over, karena setahu kami, disamping ini juga ada jalur kereta yang akan diaktivasi juga oleh kementerian perhubungan, itu juga panjang juga, sama PT KAI, jadi kami pikir berbincang-bincang sama pak kepala balai, Fly over sangat memungkinkan disana dan saya pikir juga kepala daerah mendukung, apa saja itu siap dilaksanakan, dan yang kedua, adanya itu pak ruas jalan Padang Bukit Tinggi juga itu di Padang Pariaman pak, jadi ada (rekaman tidak jelas) kereta bandara baru sampai ke kereta kota Padang yang menimbulkan adanya crossing rel kereta di jalan nasional saat ini, media jalan yang tidak terlalu besar yang pada akhirnya (rekaman tidak jelas), cuma satu lajur, dan

satu lajur lagi berbalik, dan nanti melebar pak, artinya muncul lagi, nah itu yang sekarang menimbulkan kemacetan yang luar biasa.

Itu luar biasa sekali kami berpikir untuk kiranya itu dibangun fly over, itu pak dua itu pak, ruas jalan di Sumatera Barat yang menjadi point penting.

Seterusnya pak ini juga pada pak Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, mohon bisa di pertimbangkan lagi untuk dapat beberapa ruas jalan dari Pemerintah daerah apakah itu bisa menjadi kewenangan pusat nantinya, karena memang kalau kita mengandalkan baik sedikit-sedikit saja pak tidak usah banyak-banyak dulu, bisa satu ruas dulu, tahun berikutnya bisa tambah satu ruas lagi, akhirnya itu banyak membantu masyarakat kita, kalau kita mengandalkan dari APBD setempat Bismillahirrahmanirahim 30-40 tahun lagi akan selesai.

Itu ya pak menjadi perhatian kami pada saat sekarang ini pak dalam pembahasan 2019 itu, itu mungkin barangkali pak ketua, atas waktunya, *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Ridwan, mungkin dengan juga teman-teman Komisi V DPR RI hari ini kita lebih fokus ke pikiran, usulan, program-program yang ingin kita sampaikan, waktu kita memang sampai sore, sampai malam, ada kegiatan lagi, jadi kalau ada yang ingin disampaikan harus disampaikan dicatat, ada yang mau disampaikan secara tertulis, bisa disampaikan secara tertulis, atau kita bisa juga mengundang kepala Balai, kepala Balai ini kita mengundang agar bisa menjembatani kita pada saat kunjungan kerja di daerah pemilihan, itu bisa mengusulkan kepala balai dan kepala balai merencanakan dengan Dirjen, dan nanti pada saat berikutnya kita bisa mengecek apakah usulan, apakah aspirasi yang disampaikan itu sudah masuk dalam pembahasan paska kita rapat hari ini, jadi kita tolong fokus diusulan, tetapi kalau kita juga mau tanyakan tentang usulan kita 2018 itu belum jalan boleh juga, pengawasan nanti kita akan atur waktu khusus untuk kita memberikan ruang untuk pengawasan terhadap program yang sudah ada.

Supaya waktu kita sudah lebih efektif begitu, silakan pak Ridwan.

F-PG (Ir. RIDWAN BAE):

Terima kasih pimpinan masukannya, memang sudah sama juga pikiran saya, karena buat apa saya harus mengajar para Dirjen yang hebat-hebat semua ini, mereka sudah handal (rekaman tidak jelas), yang belum handal adalah mereka memenuhi harapan kamidari DPR RI ini belum ada mereka juga, kalau kita dari Dapil kita saja.

Saya setuju pada dasarnya ini menyangkut rencana kerja tahun 2019, nomor 1,2,3,4, yang paling menarik ini nomor 1 dan nomor 2 untuk kawasan diluar perbatasan, menjaga kondisi jaringan jalan nasional agar tetap memberikan pelayanan prima bagi masyarakat terutama bagi jalur utama

logistik, mendukung hasil kawasan-kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, dan bandara.

Ini kira-kira kita setuju, jadi semua yang bapak sampaikan disini pak, saya rasa Sulawesi Tenggara (rekaman tidak jelas) yaitu di jalan jembatan yang sudah terbangun sekarang ini dengan program, ya program di (rekaman tidak jelas) yaitu rekonstruksi jalan batas Sulsel dan pembangunan jembatan teluk, disini lain Sulawesi Tenggara luas pak, banyak sekali pak Dirjen disana masalah-masalah kita hadapi.

Hujan yang begini banyak kemudian sepanjang jalan yang hancur, kemudian juga banyak juga logistik kabupaten dan (rekaman tidak jelas) antara provinsi dengan provinsi disana, jadi saya minta, saya ada beberapa usulan ini pak, yang akan diserahkan kepada pak Dirjen, termasuk, daerah pariwisata, Wakatobi itu pak Dirjen adalah 10 tujuan wisata nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, disana ada antar pulau ada 4-5 pulau disana pak, itu adalah tanah milik kawasan wisata nasional tidak satu jengkalpun tanah dimiliki masyarakat semua sudah milik nasional pak, ada satu pulau yang harus dihubungkan sama jembatan pak pulau itu, namanya pulau Kapota, dari pulau Banci disebut pulau namona, itu sepanjang jembatan 2,6 km pak.

Ini hanya perencanaan pak tahun ini kalau kita bisa, perencanaannya dulu, jangan terlalu mahal dulu, karena kapan itu bisa kita bangun berarti pariwisata disana akan berkembang baik pak, itu kira-kira antara lain, tetapi kita tidak sebut satu persatu disini pak.

Disini ada saya sudah catat masing-masing, termasuk ini juga saya ingin menekankan bahwa sudah berapa lama saya minta ini, sejak tahun 2015 pak, sudah bapak mungkin Dirjen keempat atau ketiga ini, mudah-mudahan bapak menjadi Dirjen ini terpenuhi, yaitu perencanaan dan jembatan penghubung baruta, yaitu penghubung antara botan dan muna, itu kemudian jembatan penghubung daratan muna dan daratan kendari pak, ini lagi-lagi kita minta dari sekarang kita rencanakan jauh lebih bagus, karena pembebasan lahan jauh lebih murah sekarang kalau dibanding 10-20 tahun yang akan datang pak, jadi perencanaan belum terlalu mahal ini pak, jadi pak Dirjen saya untuk memperhatikan keadaan ini.

Yang lain semua ada disini pak, semua jalan kita masukan penghubung, antara jalan nasional dengan bandara, itu juga sudah hancur semua, pada akhirnya jalan nasional (rekaman tidak jelas), itu masalahnya sudah hancur semua jalannya pak, sehingga kendaraan-kendaraan tidak bisa jalan lagi sekarang.

Saya ada usul disini termasuk peningkatan status jalan pak Dirjen, status jalan ada labuan dari (rekaman tidak jelas) kurang lebih 200meter ini pak, kurang lebih dari jalan provinsi ke jalan nasional.

Kemudian status jalan provinsi menjadi nasional jalan lingkaran Panci, ini adalah daerah wisatawan Wakatobi pak, kemudian peningkatan jalan provinsi menjadi jalan nasional, ini (rekaman tidak jelas).

Selengkapnya melalui izin pak ketua, supaya lebih cepat saya menyerahkan langsung, tetapi saya mohon pak penyerahan ini saya mohon menjadi perhatian, tidak hanya untuk diterima menghabiskan waktu lalu tidak diperhatikan pak Dirjen, saya buka dengan hormat pak Cahyadi, karena sudah lama sudah saya minta ini, agar Sulawesi Tenggara punya... tersendiri.

Ketentuan belum bisa, pak Cahyadi sering berkomunikasi tetapi di Sulawesi Tengah pak, jarang sekali kita ketemu ada kesulitan disana, tetapi sesekali memang dia datang, sesekali komunikasi dengan kita, tetapi yang terbaik kalau di Sulawesi Tenggara juga (rekaman tidak jelas).

Seizin pak ketua saya menyerahkan ini pak, biar lebih cepat selesai, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Pak Bambang, siap-siap ibu Sadarestuwati.

F-P GERINDRA (Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO):

Terima kasih bapak pimpinan.

Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI.

Serta pak Dirjen beserta jajarannya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

salam sejahtera.

Selamat sore.

Omswastiastu.

kami melihat pak standarisasi dari pelaporan anggaran ini tidak standar, ini berbeda dengan kementerian-kementerian lain pak, kami sebenarnya menginginkan dari kementerian PU ini juga sama dengan standarisasi dengan di kementerian lain, yaitu apa, pelaporan di 2018 itu harus disampaikan kepada kami, berapa serapannya yang sudah terserap selama 6 bulan, ini tidak disampaikan, terus ada kendala apa kira-kira dalam waktu 6 bulan ini, karena kebetulan saya sendiri ada di badan anggaran pak, sehingga saya bisa mengetahui persis apa yang menjadi masalah daripada bapak-bapak sekalian.

Tentu yang di 2019 juga disampaikan didalam pelaporan itu, dan kalau perlu diperbandingkan nantinya, ada permasalahan apa kira-kira disitu ini yang pertama pak, yang berikutnya adalah permasalahan yang berhubungan dengan program, ini kalau kebetulan saya sebagai anggota baru di Komisi V

DPR RI, saya belum tahu program-program yang dilakukan oleh kementerian PU yang berhubungan dengan Komisi V DPR RI, tetapi kemarin dari tenaga ahli saya menyampaikan kepada kementerian langsung tolak begitu saja pak, tidak ada anggaran untuk program yang baru, ini baru pertama kali saya menghadapi kementerian yang seperti ini.

Saya sudah posisi pernah di komisi VI pak dan sangat santun didalam memberikan satu jawaban, ini yang saya sampaikan, terus yang berikutnya lagi adalah permasalahan yang berhubungan dengan kepala Balai, kepala balai ini kalau tingkatannya Eselon II pak, dan kami ini bukannya sombong pak, kami perlu menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian, bahwa sebetulnya kami ini harusnya rapatnya dengan Presiden, karena kami sejajar dengan Presiden bukan dengan Menteri, ini sudah dengan Dirjen, tetapi saya yakin bapak-bapak Dirjen ini masih menghargai kami.

Tetapi ketua balai seenaknya sendiri, setiap ditelepon, jawabanya juga seenaknya sendiri, apalagi Jawa Timur, ada Jawa Timur disini, pak Ketut, luar biasa, dan ini keluhan ini tidak hanya dari saya yang sebagai anggota DPR tetapi juga dari Dinas Perhubungan pak, mengatakan tidak bisa diajak kerjasama yang baik, komunikasinya juga tidak ada, ini kepentingan rakyat atau tidak, tidak peduli.

Percuma di kepala balai pak, disini tidak perlu ada kepala balai, percuma kalau tidak bisa diajak kordinasi, kita tidak minta apa-apa, tidak ada pak, tanya sama ini kalau ada yang minta.

Jadi jangan begitu caranya pak, ini yang terus terang saya sangat kecewa dengan kinerja dari kepala balai yang ada di Jawa Timur dan ini sudah saya sampaikan dengan pak Dirjen Bina Marga, kalau saya punya Kepala Balai seperti itu tidak saya pakai pak, jalan Jawa Timur rusak semua pak, hancur, kayak tidak ada yang ngurusin hancur pak, bapak boleh cek di Jawa Timur, beda dengan Jawa Tengah, beda dengan provinsi Bali, Jawa Timur paling bobrok, terus kami juga sangat sayangkan pembangunan-pembangunan yang ada di kementerian PU tidak sepenuhnya menggunakan material yang ada di dalam negeri, ini terbukti pak kenaikan daripada semen, ini ada datanya semua pak dari kementerian perindustrian, saya ada semua, kita ini infrastruktur naik dari 150 trilyun di 2012, di 400 trilyun.

Tetapi coba lihat 180% pak kita ini naikan infrstruktur, tetapi penggunaan semen, penggunaan baja, tidak lebih dari 5% kenaikannya dari tahun 2012 kan lucu pak, dari 31 jadi hanya naik 2,4 juta ton dari 54,96 juta ton untuk kebutuhan baja. Semen juga begitu, kecil sekali pak, kan lebih dari 5% berarti ini, kemana ini pak, padahal ini sudah dikatakan penggunaan daripada semen dan baja yang data dari kementerian perindustrian yang dipakai dalam negeri kita, berarti larinya kemana apakah proyeknya ini fiktif atau bagaimana, saya tidak yakin kalau ini fiktif, tetapi darimana materialnya pak, tidak masuk didalam impor, ya sudah perhitunganya yang import itu tidak lebih dari sini itu total, jadi ini datanya ada saya sampaikan pak Dirjen Bina Marga, saya mengharapkan menggunakan produk-produk dalam negeri kita, sehingga BUMN bisa hidup, baik konstuksi maupun semen kita pak, semen Indonesia produksinya turun pak, dengan adanya banyaknya semen import

yang masuk dikita pak, ini yang saya sampaikan, disamping juga permasalahan yang berhubungan secara teknis ini pak, karena banyak sekali jembatan-jembatan kita yang rusak pak, dan saya lihat pada saat kemarin itu di jembatan kali Kuto yang ambruk itu hati-hati pak, karena ternyata jembatan itu tidak ada elevasinya pak, yang seharusnya jembatan itu ada punggung kudanya pak.

Itu sudah standarisasi dari kementerian konstuksi dari sipil pak, yang jembatan itu harus ada elevasinya sekitar 2 derajat sampai 3 derajat. Bapak tidak menggunakan itu dan itu flat dan saya melihat dari jauh ada kecenderungan malah nekuk kebawah, ini bahaya pak, tidak bisa pak. Ini pasti ada manipulasi didalam pembuatan konstuksi yang seharusnya punggung kuda tetapi tidak dibuat punggung kuda, ini bahaya pak, yang berikutnya permasalahan yang berhubungan dengan tol, tadi sudah disebutkan, senior saya, guru saya, yang mengatakan bahwa jalan tol ini tidak digunakan untuk angkutan logistik dan transportasi publik masal, kenapa begitu, saya sudah cek pak, karena di Surabaya Kertosono itu yang kecelakaan sudah 120 kecelakaan, 90% banyak meletus dan lebih dari 100 orang meninggal, selama kurun waktu beberapa bulan, boleh bapak cek datanya.

Kenapa begitu, saya melihat pak, jalan tol satu-satunya ya pak ya, yang ada di dunia yang menggunakan rigid pavement saya sudah sampaikan pak, rigid pavement itu adalah permukaan yang keras, dan itu tajam pak, karena ada garis-garisnya, garis serat ini yang mengakibatkan bisa menyobek daripada ban terutama ban vulkanisir, dan semua kendaraan logistik dan kendaraan publik masal. Bus maupun truk, itu belakangnya vulkanisir semua pak, hancur pak, satu jam saja berjalan disana lepas semua vulkanisirnya, bapak sudah tanya belum sama si pengguna, jawab pengguna daripada transportasi itu. Harusnya pak, rigid pavement itu tidak bisa untuk kecepatan tinggi, karena itu keras yang pertama, ini tugasnya pak balai konstruksi, bina konstuksi, langsung dilakukan penelitian K3 harus jalan.

Bahwa rigid pavement itu terbuat dari semen, yang dimana akan terjadi lumut, kalau itu musim hujan, karena itu tanah liat pak, beda dengan aspal, kalau aspal itu ada olinya pak, dan dia lebih fleksible, aspal pun harus dicampur dengan campuran apa ini, anti striping, yang dimana anti striping harus dimasukan disitu pak. Itu sudah aturan bina marga pak, ada si tahun 2009 atau 1999, harus menggunakan anti striping agar pembangunan itu bisa jangkanya waktu cukup lama, jadi ini yang saya sampaikan pak, moga-moga ini bisa bermanfaat.

Masalah anggaran tentu kita setuju saja asalkan itu bermanfaat betul-betul untuk kepentingan publik pak, jangan sampai itu seperti jalan tol yang ada di maaf ya pak, Samarinda Balikpapan tidak akan laku pak, karena Samarinda sudah dibangun pelabuhan udara sekarang pak, sehingga Balikpapan, pelabuhan udaranya tidak akan laku, Samarinda tidak akan laku, tolnya juga tidak akan laku, jadi ini yang saya sampaikan, moga-moga semuanya bisa bermanfaat untuk publik dan betul-betul memberikan satu yang terbaik buat masyarakat pak, jadi yang saya mohonkan moga-moga kita

bisa kerjasama yang baik kedepannya, tolong pak, kami ini jelek-jelek pak sejajar dengan Presiden.

Karena ada yang jadi aktor, artis, jadi itu yang saya sampaikan, terima kasih kerjasamanya semoga di 2018-2019 kita bisa sama lebih baik, terima kasih bapak pimpinan, terkait sumber daya manusia sedikit pak sumber daya manusia juga begitu harusnya dengan adanya infrastruktur yang bertambah SDM yang ada di konstruksi, ini juga harus bertambah pak, saya lihat hanya kecil sekali tidak signifikan, terus yang bersertifikat juga sangat kecil sekali, tidak signifikan, karena tidak lebih dari 10% yang bersertifikat, tolong ini ada lembaganya sendiri pak sertifikasi, bisa melibatkan lembaga-lembaga yang lain kalau misalnya bapak tidak sempat untuk melakukan itu, terima kasih pak Dirjen, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, om santi santi om.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih bapak, Ibu Sadarestuwati, siap siap Pak Joni Allen.

F-PDIP (HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.

Juga yang saya hormati seluruh mitra Komisi V DPR RI dari kementerian PUPR, Direktorat Jendral Bina Marga dan Direktorat Jendral Bina Konstruksi.

Tadi banyak hal disampaikan baik oleh pak Joseph Umar Hadi berkaitan dengan capaian daripada pelaksanaan anggaran untuk 2018 dan sudah beberapa teman sudah menyampaikan, dan saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya hanya papasan saja dengan sebisa mungkin ini sedikit di genjot, agar nanti ketika hampir selesai masa akhir anggaran ini, tidak keteteran, itu saja pesan saya dan untuk pertanyaan, bapak khususnya untuk Direktorat Jendral bina Konstruksi, akhir-akhir ini dengan maraknya kejadian kecelakaan konstruksi saya rasa perlu ketegasan dan juga lebih diperketat didalam pelaksanaan SOP, disini sebagaimana tadi disampaikan oleh pak Joseph bahwasannya memang tidak sedikit pekerjaan-pekerjaan ini ketika dilaksanakan pada malam hari petugas dari pengawas tidak ada, atau konsultanya juga tidak ada ditempat, sehingga ini salah satu yang memicu daripada pelanggaran dari SOP tadi, ini juga kemudian memicu terjadinya kecelakaan konstruksi.

Saya kira sebenarnya bisa dilakukan walaupun ktia pada kapasitas hari ini mempercepat apa, target penyelesaian daripada pelaksanaan pembangunan konstruksi infrastuktur yang ada, kita memang ada target untuk

penyelesaian, tetapi bukan berarti dengan adanya target ini ... tingkat keselamatan daripada pekerja konstruksi, untuk itu saya kira kalau perlu ada pelatihan-pelatihan tenaga konstruksi yang dilakukan oleh Direktorat Bina Konstruksi alangkah baiknya dan ini satu keharusan untuk lebih di alokasikan anggaran yang lebih besar dan pelaksanaannya juga dilakukan secara terus menerus, sampai kita yakin bahwasannya masyarakat pekerja konstruksi ini benar-benar memahami dan juga memiliki sertifikat apa sebagai tenaga kerja konstruksi, tentunya ketika sudah memegang sertifikat ini maka harus ada satu punishment yang tegas dari Pemerintah apabila terjadi pelanggaran pada saat melaksanakan kegiatan konstruksi.

Ini untuk yang Direktorat Jendral Bina Konstruksi, akan tetapi masih banyak lagi bapak tentunya yang implementasi dari Undang-undang Jasa Konstruksi yang benar-benar belum Undang-undang ... dan isi dari Undang-undang yang belum di implementasikan pada saat ini saya kira supaya tidak apa namanya, boleh dikatakan sia-sia, kita berjibaku untuk bisa melahirkan Undang-undang ini tentunya dengan keinginan agar pelaksanaan kegiatan konstruksi bisa berjalan dengan baik, dengan aman, tentunya Undang-undang ini harus diimplementasikan secara utuh.

Kemudian saya beranjak pada Direktorat Jendral Bina Marga, bapak ini untuk Jawa Timur saya perlu sampaikan, bahwasannya pelaksanaan pembangunan jalan tol, dari Surabaya sampai Jawa Tengah, Solo, ini belum terselesaikan secara utuh, dan disitu ketika dari Surabaya kita turun ... dan Kedung Mulyo inikan terjadi penumpukan Disdang, bahkan saya kurang lebih 2 minggu yang lalu karena perjalanan saya ingin ngecek sebenarnya. Apa benar yang disampaikan pak Bambang Haryo teman satu komisi ini, bahwasannya untuk tahun ini adalah mudik yang terburuk, saya ingin ngecek apa benar ya, ternyata yang saya alami kemacetan itu pada daerah turunan pada bandar Kedung Mulyo, itu sampai di Kertosono bapak, jadi seperti beberapa waktu yang lalu, saya beberapa kali mengusulkan agar segera dibangun Fly Over yang di Kertosono.

Sebenarnya kalau kemudian ini kita tunda-tunda, kita akan berpikir nanti bahwa ketika jalan tol ini sudah terselesaikan, sudah nyambung sampai di solo, mungkin akan berkurang kemacetan ini, akan tetapi saya tidak berpikir seperti itu, karena itu jalanan inikan dari Kediri, kemudian dari Kertosono, sendiri dari Nganjuk dari Surabaya, dan itu sangat berbahaya seperti halnya dulu di Peterongan, yang kemudian di bangun fly over, yang alhamdulillah ternyata itu sangat membantu dan terjadi kemacetan di daerah tersebut, saya kira ini bisa di prioritaskan untuk membangun flyover yang di Kertosoni ini, bapak saya mohon dengan sangat ini, ini beberapa waktu yang lalu, saya juga bertemu dengan Plt. Bupati, juga dengan Camat Kertosono, meminta supaya fly over segera bisa terbangun, karena itu juga pertemuan dengan masyarakat Kertosono.

Bahkan saya juga langsung menghubungi pak Kabalai, saya menghubungi pak Ketut, seperti ini permintaan dari masyarakat nganjuk, dari Pemerintah kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah kalau saya yang telepon langsung diangkat, mungkin karena perempuan ya, kalau perempuan kan suaranya berbeda dari laki-laki, alhamdulillah saya kalau telepon pak Ketut

langsung diangkat tidak pakai menunggu nanti atau besok, langsung saja diangkat, alhamdulillah jadi tidak pernah terjadi apa miss atau ada gap atau kesulitan untuk bisa menghubungi beliau, kalau saya sulit-sulit (rekaman tidak jelas), saya labrak kekantor begitu saja, tidak usah angel-angel, jadi tolong itu diutamakan, kemudian juga saya juga melihat tadi dari beberapa prioritas, dari salah satunya adalah untuk rehab jalan dari Waru sampai dengan mana tadi, ya pada prinsipnya Waru sampai dengan Nganjuk bisa di lakukan rehab, secara bertahap walaupun secara bertahap, minimal, bahwa ini adalah jalan nasional, masih tidak semulus pipi saja, tetapi ya ojo teman-temen.

Jadi itu, kemudian juga titik kemacetan ada di Sara dan sampai dengan masuk pintu Wilangan, ini juga terjadi kemacetan panjang, dan apa, cukup memakan waktu, seharusnya In Sha Allah kalau jalan tol ini sudah nyambung, kemudian kalau saya dari Jombang mau ke Madiun, mungkin tidak sampai 1 jam tidak sampai, kalau sekarang masih memakan waktu lebih dari 2 jam karena ada kemacetan di beberapa titik tadi, semoga saja Pemerintah dalam hal ini kementerian PUPR bisa bekerja lebih masif lagi, sehingga bisa segera tercapai keinginan masyarakat untuk bisa menikmati jalan tol dari Jawa sampai Jakarta.

Juga berkaitan dengan jembatan gantung, saya juga memohon maaf beberapa waktu yang lalu mengusulkan jembatan gantung, sebenarnya ini daerah yang amat sangat membutuhkan seperti yang sudah dimuat diberbagai media, dimana anak-anak sekolah harus jalan melewati sungai bahkan dari teman-teman Balai sudah melihat, akan tetapi waktu itu itu ada kepentingan politik sehingga kepala desa menolak, warga masyarakat yang sekarang protes kenapa di tolak, hanya karena alasan tidak bisa dilewati mobil, padahal yang punya mobil cuma kepala desa saja

Sementara masyarakat yang 40 KK ini tidak ada yang mempunyai mobil, anak-anak kita jalan kaki cukup jauh, saya sudah mencoba jalan bapak, dari titik desa itu sampai nyebrang 1,5 jam jalan kaki hanya berangkat saja, pulang juga 1,5 jam. Itu kalau banjir mereka harus diam dulu, menunggu sampai surut baru bisa pulang, kemarin masyarakatnya minta supaya itu diwujudkan dan juga kepala desa pada akhirnya nelepon minta agar bisa segera diwujudkan, tetapi saya bilang ya nanti, karena ini sudah terlanjut dialihkan didaerah yang lain, mak adari itu pada kesempatan kami ini saya berharap apabila nanti ada yang tidak terserap atau mungkin tidak jadi membangun jembatan gantung, saya mohon kiranya itu bisa di prioritaskan.

Dan yang terakhir, berkaitan dengan hasil kunjungan kerja di Sumut, dimana pada waktu itu kami mengunjungi daerah, sebentar saya lupa, namanya ini, di Tapanuli Utara, ini kebetulan Bupatinya adik dari salah satu anggota Komisi V DPR RI, maka dari itu tadi saya dibisiki tolong Estu kamu sampaikan kepada Pemerintah bahwa untuk membangun jalan lingkaran sibirong-borong itu sangat diperlukan, maka dari itu pada kesempatan ini saya sampaikan dan juga karena ini merupakan hasil dari kunjungan kerja Komisi V DPR RI saya mohon kiranya ini bisa menjadi prioritas di anggaran 2019 nanti, saya tidak tahu berapapun yang penting dicantolkan dulu dan itu merupakan menunjukkan bahwa kita serius bisa menyelesaikan permasalahan

itu, saya kira itu pimpinan yang perlu saya sampaikan, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih bu Estu, jadi Kepala Balai Jatim, pak Ketut ini baru terbuka rahasianya pak, bapak lebih dekat dengan ibu-ibu saja, tetapi saya kira apa yang disampaikan pak Bambang (*rekaman terputus*) karena mitra kita percaya saja bahwa apa yang sudah kita lakukan yang kita bahas itu sudah masuk 3 sehingga untuk itu maka teman-teman anggota juga kita persilakan kalau mau ada yang buka satuan tiganya untuk 2018 untuk di (*rekaman tidak jelas*) karena memang dalam perjalanannya sudah di akomodir dirapat kita disini, program yang masuk tetapi supaya anggota Komisi V DPR RI itu (*rekaman tidak jelas*) ya sudah yang penting masuk saja programnya anggarannya nanti.

Sekian saja dulu, terus kemudian tahun depan lagi, begitu saja terus pak, untuk itu maka kita minta pak Dirjen pakai bahan presentasi sebelumnya, bapak coba, saya kira apa Dirjen punya bahan presentasi tahun sebelumnya pak, jadi (*rekaman tidak jelas*) tidak substansi kita tidak perlu, tetapi walaupun ini pertemuan pertama pak, ini kita mau sampaikan pertemuan berikutnya itu sudah apakah tadi disampaikan oleh pak Jhoni, ini di kita melihat ini kayak di NTT kalau saya melihat seperti ini saja, waduh kok NTT satu program saja, tidak tahu satu program itu apa. untuk itu maka kita minta tolong digambarkan kita minta membuka File tahun sebelumnya.

Kita minta tolong digambarkan kita minta membuka file tahun sebelumnya, saya kira itu pak, sebelumnya kita sudah masuk kewilayah itu ini kita sekarang sudah jam 5 kurang 15, kalau di jadwal kita itu jam 5 kita sudah harus masuk di sesi berikutnya dengan Dirjen Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan.

Saya mau tanya kepada Anggota, ini sekarang masih ada 20 anggota, belum pimpinan, saya minta saran pada anda, kami membuka pimpinan membuka untuk memberikan ruang kepada anggota untuk menyampaikan pandangan pikiranya berkaitan dengan pembahasan anggaran disini, kenapa kita pakai konsiyering juga, ya kita berharap supaya kita bisa memanfaatkan betul ini, ruang ini, kalau perlu memang harus sampai malam ya sampai malam.

Tetapi kalau anggota merasakan bahwa oke kita berikan waktu sebagaimana diatur dalam tata tertib, kita kasih 3 menit, kemudian nanti ada masukan kita beri ruang lagi setelah teman-teman anggota berbicara, apakah saya mau minta pandangan, ini masih ada 20 menit, kalau misalnya tadi saya sampaikan kalau kita mau fokus kita menyampaikan langsung apa yang kita mau usulkan atau apa yang kita rasa tahun lalu kita usulkan, ini pak Dirjen PHP saja, ini apa sih itu PHP istilahnya, pemberi harapan palsu, kalau itu tidak masuk, yang usulan tahun lalu, terus bagaimana jalan keluarnya pak, kan begitu.

F-PD (DRH. JHONI ALLEN MARBUN, MM):

Bisa sedikit pak interupsi.

Saya mohon maaf pak, kita tidak mengharapkan (rekaman tidak jelas) ini mohon maaf, kita tidak ada mengharapkan dari pada mitra kerja kita, kita bermitra untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan ketersediannya anggaran.

Saya mohon maaf ini, harapan palsu, ini lembaga sama-sama lembaga tinggi pak, saya tidak menyamakan, kita punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupoksinya, bapak sebagai eksekutif kami sebagai legislatif ini mohon maaf, oleh karena itu mari kita letakan pada proporsinya, (rekaman tidak jelas) saya mohon maaf pak, masa esekutif memberi harapan kepada eksekutif, kita bisa tolak, karena dia kok tidak, maksud saya begini, mohon maaf kita sama-sama mari kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan nasional, bapak sebagai pelaksana, kami sebagai mitra untuk mendukung pelaksana dalam perencanaan anggaran dan sekaligus pengamanan begitu pimpinan, jadi memang harus begini suaranya, karena aslinya dari sana.

.....:

Terima kasih pak ketua, saya mau sampaikan ke pak Dirjen, saya sependapat dengan pikirannya tadi, dapil juga penting pak, saya butuhkan dapil saya juga pak. (rekaman tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih pak Ridwan.

Pak Jhon ini sebenarnya PHO itu bahasa ledekan saja pak, ini kita semua menjalankan tugas.

(rekaman tidak jelas)

Ini makanya saya minta pendapat, pikiran, kenapa kita konsinyering, kenapa kita konsunying, kita siapkan fasilitas kalau sampai malam ya sampai malam, tetapi semua harus ada usul, pendapat, (rekaman tidak jelas).

Baik pak, terima kasih, kalau pak ... sudah ngomong seperti itu ya kita dengar, tetapi saya sebagai pimpinan juga harus minta pandangan, pikiran, kepada seluruh anggota ya, saya pikir itu yang saya mau sampaikan, sebentar ini teman-teman banyak yang baru, saya harus luruskan, saya harus sampaikan istilah-istilah PHP itu istilah-istilah berkaitan dengan bahasa-bahasan kita di Komisi V DPR RI, tetapi semua kita lakukan pembahasan ini adalah berkaitan dengan kewajiban dankita yang berkaitan dengan anggaran, itu yang mau saya sampaikan, saya kembalikan kepada kita, waktu, apakah kita mau memanfaatkan waktu ini sebesar-besarnya, memberikan ruang kepada seluruh anggota, seluruh anggota, kalau begitu kita berikan ruang kepada seluruh anggota.

Kalau mau saya tegas, saya hanya berikan waktu sebagaimana, MD3 kita diberikan waktu 3 menit sampaikan kita kasih waktu kemudian saya

potong, ini masih ada 20 menit, kalau saya pikir, kalau memang tidak selesai bina marga, ini pikiran saya ini, kalau memang Bina Marga sampai malam, sampai besok pagi, sampai besok pagi saja, ini jarang loh, apalagi ini pembahasan seperti ini, tetapi saya kira pasti teman-teman tidak mau seperti itu, kalau begitu saya mau mengingatkan saja, silakan manfaatkan waktunya, itu secara baik, tetapi ingat juga bahwa ada teman-teman lain mau sampaikan pandangan pikirannya. Silakan pak Kyai tolong bantu saya carikan jalan keluarnya.

.....:

Saya kira kita fokus soal waktu, jadi kita batasi sampai jam 7, dengan Dirjen Bina Marga, lalu berikutnya jam 8 atau jam 9, dengan Dirjen Cipta Karya, memang agak molor kemudian tetapi semua teman-teman bisa berbicara dengan ... saya kira itu.

KETUA RAPAT:

Baik ya, kita batasi dulu, kita mau selesaikan dengan Bina Marga ini jam berapa.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I):

Pimpinan masuk tetap para anggota yang hadir disini harus diberi kesempatan, saya kira jadi mungkin waktunya dibatasi, seperti itu, tetapi kalau dibatasi sampai jam 7 ternyata belum menyampaikan aspirasinya belum menyampaikan pertanyaan dan sebagainya saya kira itu tidak adil, jadi tetap harus diberi kesempatan, cuma mungkin setiap orang dibatasi misalkan berapa menit atau berapa detik misalnya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih, ini kalau kita mau targetkan waktunya seperti itu, ini kita ada 20 kalau kita kasih masing-masing 5 menit saja dulu, kalau misalnya ada yang masih kurang, beri kesempatan kepada anggota lain, baru nanti kita gilir lagi, masing-masing 5 menit ya.

(RAPAT SETUJU)

Waktu 5 menit, saya agak sedikit ketat sekarang, ibu Wardatul, sial-siap pak Suwartono, 4 menit, kalau ada yang memanfaatkan langsung boleh.

F-PPP (Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH):

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang terhormat pimpinan Komisi V DPR RI.

Yang terhormat para Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI.

Yang terhormat pak Dirjen Bina Marga.

Serta seluruh jajaran yang saya hormati.

Untuk Dirjen Bina Marga, kita tahu bahwa Dirjen Bina Marga ini adalah merupakan entitas pengelola anggaran yang cukup besar juga, oleh karena itu baik buruknya kualitas pelaksanaan program akan berpengaruh signifikan terhadap visi maupun strategi yang sudah ditetapkan yaitu terwujudnya sistem jaringan jalan yang handal, serta terpadu diseluruh wilayah tanah air, tadi kawan-kawan telah melengkapi persoalan anggaran, yang memang sebetulnya kami ingin sekali bapak memberikan penjelasan penyerapan anggaran secara terperinci, tetapi walaupun disini telah ada realisasi fisik maupun realisasi keuangan dan ada grafik yang ini menurut kami memang merupakan perspektif, merupakan gambaran tetapi kami tidak bisa terlalu jelas untuk bisa menggambarkan penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Mei ini seperti apa, sehingga kami tidak bisa, belum bisa menggambarkan apakah penyerapan anggaran ini sudah maksimal ataupun masih kurang.

Yang ingin kami tanyakan kalau memang sekiranya bapak sudah bisa menggambarkan atau sudah tahu, sampai dengan saat ini penyerapan anggaran ini kurang, ini kendala yang paling dasarnya dimana, ini kami mohon penjelasan, kemudian selanjutnya tadi kami telah menjelaskan juga paparan dari bapak Dirjen Bina Marga, bahwa program strategi untuk 2019 adalah antara lain jalan bebas hambatan seluas 1000 km kemudian pembangunan jalan nasional untuk pemeliharaan jalan nasional kurang lebih 47.000 km dan kemudian juga pembangunan jalan fluy over, tentu dari beberapa program ini kami sangat mendukung, apalagi dikaitkan dengan kondisi di Dapil saya tentu saja, dimana Dapil saya adalah di Kabupaten bekasi dan Purwakarta, untuk jalan nasional yang dilintasi oleh Dapil saya yaitu kabupaten Bekasi dan Purwakarta, memang masih perlu perhatian untuk pemeliharaan karena beberapa jalan kami lihat masih ada yang bolong-bolong pak, untuk tahun 2009 ini, 2019 ini kami mohon perhatian, kemudian juga ada titik-titik kemacetan yang luar biasa, di dapil kami yang memang sulit diuraikan dari waktu kewaktu tidak hanya pada jam-jam kantor tetapi sepanjang waktu itu antara lain adalah ruas jalan menuju ataupun keluar jalan Tol Karawang, pintu tol Karawang Barat ini luar biasa pak, jalannya memang masih segitu-segitu saja tetapi volume kendaraanya luar biasa, sehingga disetiap saat didaerah ini sangat macet dan mungkin kami berharap bapak bisa membuatkan jalan baru atau apalah namanya mungkin fly over dan lain sebagainya, ini tolong diperhatikan.

Ini juga usulan dari warga kepada kami terhadap macetnya jalan lintasan menuju jalan tol ini yang luar biasa, kemudian ada satu ini agak diluar pembahasan tetapi ada titipan dari warga di Dapil saya kabupaten Bekasi, karena kabupaten Bekasi ini ada bangunan jalan tol, jalan tol Cilincing, Cibitung, dimana untuk realisasi daripada pembayaran pak, ada beberapa warga yang sudah memberikan berkas kepemilikan atas tanah dan bangunan kepada Jasa Marga, Bina Marga tetapi ketika dia untuk mengambil

uangnya ke bank ini selalu dijawab kosong, ini terjadi sebelum lebaran, setelah hari raya kemarin itu dilihat lagi masih kosong, ini mohon menjadi perhatian, karena ini meresahkan dan tentu saja warga sangat membutuhkan itu.

Kemudian kepada bapak Dirjen Bina Konstruksi, saya tidak ingin bertanya, tetapi saya hanya sangat-sangat berharap bahwa dengan beberapa waktu lalu kecelakaan terus terjadi pak, saya kira ini mohon perhatian secara khusus mudah-mudahan kedepan tidak ada lagi, saya yakin setiap kejadian kecelakaan pembangunan konstruksi itu dari pihak bapak ada evaluasi-evaluasi dan saya yakin juga dari evaluasi itu bapak mempunyai strategi-strategi kedepan agar bisa mengurangi mungkin harapan saya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan.

Itu harapan saya kepada Dirjen Bina Konstruksi, saya kira pak ketua saya manut, aturan ketua, itu saja sekali lagi saya mohon perhatian bapak-bapak semua untuk dapil saya, yang telah harapkan untuk bisa direalisasikan pada program yang akan datang, demikian, *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih ibu, jadi seadanya kordinasi dengan kepala balainya, dijalan itu mestinya urusan Dapil itu sudah selesai ditingkat daerah pemilihan, pak Suhartono siap-siap pak Sahat Silaban.

F-NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Ketua dan anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Mitra kerja dari Departemen PU beserta jajarannya yang saya hormati.

Saya ingin singkat saja dan fokus kepada Dapil saya, Dapil 8 Jawa Timur, anggota di Komisi V DPR RI ini dari Jawa Timur banyak, jadi saya kelola itu hari ini yang di ... itu balai 8. Ini pak Dirjen kebetulan saja, pertama tol exit ke Madiun itu penyebab kemacetan, walaupun tidak haru raya macet, apalagi nanti ini Madiun dulu Solo sudah oke sudah di buka Presiden, kemarin kalau Surabaya Madiun juga sudah oke itu nanti yang macet, itu di madiun yang kemarin itu buntutnya itu melebihi kota Madiun yang kemarin itu buntutnya itu melebihi kota Madiun, jadi dari exit tol itu menjadi 10 km, ini perlu pemikiran oleh karena itu, saya selaku anggota Dewan di Komisi V DPR RI mengusulkan bahwa akses masuk tol tersebut dilebarin, dan sekarang sudah ditender, mungkin juga sebentar lagi dikerjakan.

Cuma yang perlu saya sampaikan disini itu proses tender dilaksanakan balai 8, ini mengecewakan kontrak Tor yang notabene punya hak dan kapasitas yang luar biasa menurut penilaian saya. Di pemenang satu dan dua itu ada selisih kurang lebih 2 milyar lebih dikit, konon kalau di tanya, 2 milyar lebih sedikit itulah yang dimanfaatkan.

Kalau itu yang terjadi itu sangat prihatin pak, kemudian saya juga evaluasi, jelek-jelek saya ini kontraktor dan saya tahu kualitasnya bagaimana, jadi yang dimenangkan itu daerah dari tempat itu 100 km, kalau proyeknya itu (rekaman tidak jelas) bisa dibayangkan, waktu di ... itu sudah menyatu, kualitasnya pasti rendah belum hotmix itu pasti lebih dari 3 jam, bapak bisa bayangkan itu, ini menurut saya pembelajaran untuk tidak diulangi lagi, di balai 8, ada kontraktor yang bersangkutan, kebetulan (rekaman tidak jelas) didalam pantai saya bilang, ya sudahlah yang lalu biarlah berlalu, karena dalam pikiran saya itu berkecambuk masa lalu, waduh ini jangan-jangan timbul di Madiun, itu surat yang ke KPK saya minta coba (rekaman tidak jelas).

Sudah tidak usah pakai beginian, sampai saya begitu pak, ini catatan, tetapi yang terpenting untuk Madiun exit itu lebih penting daripada cakupan eksit, jadi cakupan exit itu tidak serapat Madiun Exit pak, karena dibelakangnya ada kota Pacitan, Ponorogo, Magetan, itu pak, macetnya luar biasa, sampai apa namanya buntutnya sampai (rekaman tidak jelas).

Kemudian ... tadi dikemukakan oleh teman-teman juga, air yang menggenang diseperti exit kalau dulu itu dua hari sudah lenyap itu sekarang lebih dari 3 hari, apa ini, apa gorong-gorongnya kurang lebar atau pompanya kurang lebar, tetapi sebagai masukan pak saya sudah selaku anggota di Komisi V DPR RI saya mengusulkan pelebaran kali disitu namanya kali jeroan dan sekarang sudah didesain sedemikian rupa In Sha Allah kalau itu jadi itu ya banjir cuma dalam hitungan jam, saya kira itu.

Kemudian, kalau kawasan (rekaman tidak jelas) diluar bapak ya, karena itu sudah ada badan sendiri, kemudian untuk bina konstruksi pak, yang namanya badan usaha jasa konstruksi itu sudah tertunda-tertunda dan tertunda lagi, kalau tidak salah tidak hanya setahun dua tahun, itu sudah lebih dari 4 tahun, padahal harapan kita ketika jasa konstruksi sudah di dok begitu segera action yang namanya jasa konstruksi itu kan perubahannya sangat cepat, artinya itu klasifikasi itu sangat cepat, jangan stay seperti sekarang ini, jadi saya pikir itu penting apakah nanti modelnya tetap seperti dulu, kerjasama dengan LPJK atau tidak nah itu terserah.

Saya pikir juga jangan terlalu fokus ya fokusnya dibagi, jangan asosiasi profesi yang di apa, yang di apa ya, yang digenjot pendidikannya, itu hanya mandor, tukang kan sekarang yan konon akhirnya dimanfaatkan untuk menjatuhkan ketika para kontraktor itu tender, ini masukan untuk bapak, ada sertifikat keahlian itu bisa hari ini minta minta besok sudah jadi, disini penuh permainan, inilah data, saya bisa menunjukkan itu, kalau sertifikasi semacam itu, itu untuk permainan para tender, para pemain tender yang kira-kira direstui oleh tidak tahusaya, karena ini klasik pak, saya disitu sudah sangat lama, anda perlu tahu saya disitu hapal, oleh karena itu saya mohon pak Dirjen, jadi saya minta yang sertifikasi badan usaha, itu diprioritaskan dulu, sehingga sertifikasi ini muter.

Saya kira demikian pak ketua, terima kasih, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak, saya biasanya izin Bina Marga ini pak Dirjen saya izin mau sholat, kita bisa break sholat dulu, berapa menit pak.

15 menit ya yang mau sholat, tetapi ya 15 menit ya, kita izin sholat, kita skors dan kita masuk lagi 15 menit dari sekarang.

RAPAT DISKORS

SKORS DICABUT

Baik pak Sahat Silaban kita beri kesempatan dan selanjutnya siap-siap pak ... ahli hisab, tadi kami ngomong-ngomong dibelakang setelah break ini, itu kalau katanya bisa dibawah 5 menit lebih bagus, tetapi tetap 5 menit saya akan mengingatkan.

Kami persilakan pak Sahat Silaban.

F-P NASDEM (SAHAT SILABAN):

Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati pimpinan Komisi V DPR RI.

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi V DPR RI.

Yang kami hormati bapak Dirjen Bina Marga beserta jajarannya.

Tadi memang sudah disampaikan teman-teman terutama masalah pak Edy, pak Jhoni Alen Marbun, demi Tuhan saya (rekaman tidak jelas), jadi saya tidak perlu panjang-panjang lagi pimpinan, barangkali mengingatkan sebagian tentang hasil kunjungan spesifik, belakangan ini ada kita 3 kali kunjungan spesifik ke Dapil saya pimpinan, adapun kunjungan spesifik itu sesungguhnya karena permintaan dari kepala-kepala daerah, untuk melihat secara langsung tentang infrastruktur disana, saya pertama-tam asaya sampaikan masalah kunjungan spesifik, khusus di Tobata, waktu itu kami dengan Kepala Balai sudah meninjau sesuai dengan permintaan kepala daerah, Tubasa, diminta ada pembangunan jalan dari porsea kearah (rekaman tidak jelas).

Dengan itu dibangun sesuai dengan perhitungan analisisnya ratusan milyar, petani-petani dari kawasan danau toba khususnya dari Tobasa diuntungkan, akhirnya memotong itu ratusan kilometer jalan, kalau tidak salah 120 kilometer, terpotong dengan terbangunya jalan kurang lebih di 14 kilo. 14 kilo, ratusan kilometer, itu salah satu harapan kita pak, khususnya di Tobasa, itu kunjungan sepesifik kita kemarin ada beberapa divisi yang terealisasi.

Uang kedua, kunjungan sepesifik juga di kabupaten Tapanuli Utara, ada dua titik waktu itu salah satu tadi sudah disampaikan bu Estu untuk bikin by pass di gorong-gorong. Terus yang kedua, ada jalan katanya disana banyak patahan-patahan, tidak tahulah, yang jelas tekniknya dari (rekaman

tidak jelas) bisa cari solusi itu, bahkan sampai sekarang masih ada 3 alat disana, alat untuk menarik kendaraan apabila terpuruk, dipersiapkan disitu, diperbatasan, Tapanuli Utara ke Tapanuli ... ya pak ya pak Kepala Balai, jadi ada 3 diundi disana (rekaman tidak jelas) untuk menarik apabila kendaraan terpuruk, hal itu kami tinjau sama kepala balai beliau mengharapkan anggaran supaya diarahkan kesana, sebelumnya sudah bagus dan sesudahnya juga sudah, hanya itu sekarang yang menjadi penghambat disana.

Yang (rekaman tidak jelas) di jalan .. kami sudah bersama-sama dengan pak Menteri melihat itu supaya dibuatkan akses lain jangan lagi masuk terowongan itu, dijabarkan (rekaman tidak jelas).

Jadi apa yang diperlukan pak (rekaman tidak jelas) itulah bagian daripada lintas barat, harapan kami sebagai wakil rakyat dari sana boleh itu diskala prioritaskan, terus ada surat pak kekita, surat dari 5 bupati sama satu walikota di Pulau Nias, kabupaten itu kita kunjungan kesana ada pak pimpinan pak ketua, yan sehat kita lalui 1,5 jam waktu itu kita hampir 5 jam, bukan hanya ngeceknnya, bukan.

Bukan karena ngeceknnya makanya kita sampai mendekati 5 jam yang harusnya 1,5 jam, jalan disana itu rusak akibat tol gempa dulu waktu Tsunami, itu jadi harapan kita sebenarnya itu bisa kalau mungkin masalah Undang-undang hanya sekali 5 tahun untuk mengangkat status jalan, tetapi sekarang persoalannya dibutuhkan saat itu, ditengah-tengahnya pulau Nias, (rekaman tidak jelas).

Mohon di pertimbangkan dan diakomodir langsung, paling tidak kalau menunggu (rekaman tidak jelas), paling tidak perbaikan setempat di pulau Nias itu pak.

Itu saya kira tentang Dapil saya, salah satunya tadi yang dimohon ibu Estu melalui petunjuk dari, darimana bu Estu, ini sudah lupa ini, ada jalan by pass di gorong-gorong itu, bapak sudah tinjau waktu itu sama pak Anton juga, harapannya karena 3 kali seminggu pas kota gorong-gorong itu selalu macet coba kalau kita buat by pass diluar daripada kota sama gorong-gorong.

Jadi itu barangkali tentang Dapil saya, saya tinggal di Banten pak, sudah 32 tahun, kalau saya lihat, kalau saya bilang ya (rekaman tidak jelas) kita membangun daerah terluar tetapi yang terdekat ke Ibu Kota sekalipun kita tidak melihat, masih banyak yang sangat prihatin didaerah diperbatasan yang terdekat dengan Ibu Kota, akhirnya itu kita anggap sebagai penyanggah Ibu Kota, jadi jangan terus, bukan tidak terima pembangunan diluar, sebenarnya kita jangan tutup mata juga, didaerah terdekat dengan ibu Kota, begitu kira-kira harapan kita kedepan, termasuk juga nanti di perhubungan, karena sangat banyak yang harus di benahi oleh departemen perhubungan, jadi jangan hanya berpikir untuk membangun daerah terluar Republik, tetapi yang terdekat dengan Ibu Kota Republik juga tertinggal.

Saya kira itu saja pak ketua, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Jadi saya menegaskan kembali komitmen kita tadi bahwa kita akan menyelesaikan rapat ini tentu saja tanpa dibatasi waktu berakhir, tetapi setidaknya-tidaknya jam 7 bisa selesai.

Kita komitmen 5 menit, mudah-mudahan kawan-kawan bisa memperhatikan waktu, selanjutnya kami persilakan pak, oh lagi keluar, kalau begitu ke ibu Intan Fitriana.

F-PAN (HJ. INTAN FITRIANA FAUZI, S.H.,LLM.):

Terima kasih pimpinan Sidang.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat pimpinan sidang.

Bapak Ibu anggota Komisi V DPR RI.

Yang terhormat bapak Dirjen Bina Marga beserta jajaran.

Bapak Dirjen Bina Konstruksi beserta jajaran, dan seluruh Balainya.

Perkenalkan saya Intan dari Fraksi PAN, pak Dirjen Bina Marga, terkait Dapil Kota Depok Jabar VI, saya ingin bertanya mengenai koordinasi penanggulangan kemacetan khususnya di Depok karena Depok itu adalah penyangga Ibu Kota, beberapa ruas jalan terutama koridor utara dan Selatan, Cinere, Margonda Raya telah mencapai titik penuh, sementara dalam RPJMD kota Depok 2016-2021 menegaskan bahwa tantangan Depok adalah memaksimalkan pembangunan jalan dengan mengikuti pertumbuhan jumlah kendaraan dan luas wilayah, tahun 2010 Depok seharusnya sudah membangun 1861 km jalan kota yang terbangun, namun kenyataannya sampai dengan 2015 baru 476,15km yang dibangun, dengan kemacetan ini, karena seluruh kota Depok itu terpusat di dua titik, sehingga menimbulkan kemacetan yang sangat parah, itu satu pak, yang kedua mengenai drainase pemukiman warga, karena ketersedianya drainase maka penduduk itu semua swadaya, mereka membuat pipa-pipa dan karena elevasi jalan lebih tinggi dari lahan mereka sehingga mereka membuang kelahan lain, lahan lain, debit air akhirnya membuat genangan atau bahkan malah banjir.

Itu permasalahan banyak sekali pak di Bekasi dan Depok, kemudian terkait dengan jati jajar saya mohon informasi, mohon dikoreksi kalau saya salah, pembangunan di terminal tersebut sudah selesai namun sampai saat ini belum dapat beroperasi karena ketentuan kewenangan pengelolaan terminal tipe a, jadi diserahkan kepada Pemerintah pusat, terkait Undang-undang nomor 23, kami mohon konfirmasi, rencana operasional tersebut, karena saat ini warga resah menjadi tempat kriminal.

Terakhir pak, pertanyaan saya, di halaman ngak pak, di halaman 16 karena ini menyangkut nawacita Pemerintah mengenai kawasan industri disebutkan bahwa Renstra Dirjen Bina Marga tahun 2015-2019 dukungan

jalan di 15 kawasan industri yang menjadi prioritas, kita tahu kawasan industri itu sudah banyak dipublish mohon data mengenai dukungan jalan, karena kita lihat sebaran yang ada di peta, mayoritas terpusat ada di Sulawesi sementara di tempat lain kalau bicara Karawang Bekasi tidak masalah, tetapi Sumatera antara lain hanya satu, sementara itu sudah lama tidak berjalan.

Ada beberapa kawasan industri yang sudah menggunakan anggaran perindustrian, dan dari Pemerintah kota, Pemerintah provinsi sudah ada dukungan, juga dari kementerian PUPR antara lain, BPJP juga kita apresiasi, sudah melakukan titik jalan tol yang tidak jauh dari kawasan-kawasan tersebut, namun yang menjadi masalah adalah mangkraknya kawasan industri itu karena dari PUPR apakah jalur kereta api dan juga jalan darat, outing ring road, yang menghubungkan kepelabuhan atau jalan darat ke Bandara, itu yang belum jelas pak, sementara itu sudah masuk, malah sudah menggunakan anggaran Pemerintah dalam hal ini, anggaran perindustrian dalam master planya, itu saja dari saya terima kasih, bilahitaufig walhidayah, *Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Terima kasih ketua.

Bapak Dirjen dan Bapak Dirjen Konstruksi dan para Direktur, hidup itu biasanya isinya hanya hukum relativitas, contohnya misalnya, kalau kita bisa gendong Luna Maya, satu jam saja itu rasanya seperti 1 menit, tetapi kalau kita gendong neneknya Luna Maya 1 menit rasanya seperti 1 jam...

RAPAT DITUTUP PADA PUKUL WIB